



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

LOGISTICS

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2024



Direktorat Logistik
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan

DITJEN PDSPKP



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 yaitu Kinerja Logistik Ikan Nasional adalah (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan I sebesar 112,5 (kategori Istimewa). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 18 April 2024

Direktur Logistik



Berny A. Subki

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Logistik

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Logistik

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan I Tahun 2024, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 16 (enam belas) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBK Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP, dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Koridor Logistik Hasil Perikanan yang dikelola (Koridor), Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit), Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data), Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit), Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit), Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi), Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang

dibangun (Unit), Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit), Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Miliar), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai), Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (%), Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%), dan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%). Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga), Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan), Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan), Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga), Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%), dan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%). Indikator yang bersifat semesteran adalah Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks) dan . Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Triwulan I adalah sebesar 112,5 (kategori Istimewa). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetnya pada Triwulan I. Adapun rincian capaian periode Triwulan I yaitu sebagai berikut :

- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 5 Kesepakatan; capaian 7 Kesepakatan atau 140% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 2 Lembaga; capaian 2 Lembaga atau 100%;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 50 Orang; capaian 55 Orang atau 110% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 100 atau sebesar 125% dari target;

- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 141,84% dari target.

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun demikian belum dilakukan penyesuaian pada pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp1.720.861.553,- atau sebesar 2,98% dari pagu awal.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan I Tahun 2024 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2024 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan I Tahun 2024, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	3
1.5 Permasalahan Utama	3
1.6 Sistematika Penyajian	4
II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.1.1 Sasaran Kegiatan	6
2.1.2 Kebijakan	7
2.2 Perjanjian Kinerja	7
III. Akuntabilitas Kinerja	10
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran Direktorat Logistik	99
IV. Penutup	101
4.1. Kesimpulan	101
V. Lampiran	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Keragaan Sumber Daya Manusia	3
Gambar 2.	Layar tangkap dashboard nilai capaian Triwulan I Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjajaku	10
Gambar 3.	Sosialisasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	16
Gambar 4.	Rapat koordinasi dengan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia	18
Gambar 5.	Pelatihan Rantai Pengawasan atau <i>Chain of Custody</i>	19
Gambar 6.	Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan	20
Gambar 7.	Sosialisasi Layanan Jasa Pasca Panen KBLI 03133 dan 03143	22
Gambar 8.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi WMS	23
Gambar 9.	Evaluasi Aplikasi <i>Warehouse Management System</i> CSBP	24
Gambar 10.	Rapat Koordinasi Data <i>Cold Storage</i> Lingkup Direktorat Logistik	26
Gambar 11.	Rapat Penghitungan IKLI	27
Gambar 12.	Rapat Harga Acuan Ikan	28
Gambar 13.	Survey <i>Cold Storage</i> dan Harga Ikan	30
Gambar 14.	Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP	32
Gambar 15.	Rapat Pembahasan Penyiapan Naskah Akademik Regulasi Penguatan Ekosistem Logistik Ikan Nasional	34
Gambar 16.	Rapat Penataan Regulasi Ekosistem Ikan Nasional	36
Gambar 17.	Rapat Pembahasan Integrasi Akun Sistem Inhouse NK Perikanan dan Pembahasan Pengembangan Sistem Inhouse NK Perikanan	39
Gambar 18.	Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan	40
Gambar 19.	Laporan Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024	42
Gambar 20.	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan	45

Gambar 21.	Pelaksanaan Soft Launching Ekosistem Logistik Hasil Perikanan Zona II Penangkapan Ikan Terukur Koridor Biak – Surabaya	47
Gambar 22.	Rapat <i>Brainstorming</i> Penerapan CDIB dan Persiapan Penerapan Permen KP tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan	48
Gambar 23.	Koordinasi Pengembangan Ekosistem Logistik Hasil Perikanan di Kabupaten Biak Numfor	50
Gambar 24.	Persiapan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Zona II	51
Gambar 25.	Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia	52
Gambar 26.	Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku Bantuan Pemerintah di Provinsi Gorontalo	54
Gambar 27.	Persiapan Peresmian Kalamo di Kota Bandar Lampung	55
Gambar 28.	Penyusunan Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel	58
Gambar 29.	Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Aceh Timur	60
Gambar 30.	Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kota Pekalongan	61
Gambar 31.	Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Situbondo	61
Gambar 32.	Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Konawe	61
Gambar 33.	Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Manggarai Barat	62
Gambar 34.	Rapat sosialisasi bantuan pemerintah TA. 2024	63
Gambar 35.	Rapat pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024	65
Gambar 36.	Rapat Penyusunan Pedoman Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Kendaraan Refrigerasi	66
Gambar 37.	Sosialisasi Monitoring Sistem Pada Kendaraan Berefrigerasi	68
Gambar 38.	Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sistem resi Gudang	71
Gambar 39.	Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang di Kab Pinrang	73
Gambar 40.	Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang di Kota Palopo	73
Gambar 41.	Pemantauan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut PT Satya Trinadi Komira Perkasa	74

Gambar 42.	Laporan Identifikasi Calon Pengelola Gudang SRG di Kabupaten Jember	75
Gambar 43.	Laporan Pertemuan Perencanaan Teknis Kapal Angkut Ikan	78
Gambar 44.	Rapat Persiapan Perencanaan Teknis Kapal Angkut	80
Gambar 45.	Pemantauan Perbaikan Sarana Prasarana Pasca Berakhir Masa Perjanjian Transisi dengan Perindo	85
Gambar 46.	Koordinasi dan Perbaikan Gudang Beku 2000 ton	86
Gambar 47.	Review Okupansi dan Tarif Listrik CS 2000 ton	88
Gambar 48.	Rapat Penyusunan AD/ART dan Kode Etik Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP	89
Gambar 49.	Rapat Penyusunan Uraian Jabatan Tinggi Pratama lingkup Ditjen PDSPKP	89
Gambar 50.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran s.d Periode Triwulan IV Tahun	91
Gambar 51.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	91
Gambar 52.	Rekonsiliasi Dokumen Kinerja Ditjen PDSPKP	91
Gambar 53.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	92
Gambar 54.	Dialog Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	92
Gambar 55.	Rapat Kerja Teknis Ditjen PDSPKP	93
Gambar 56.	Penyusunan Lporan Evaluasi/Program Ditjen PDSPKP	97
Gambar 57.	Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik	8
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan I Tahun 2024	11
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	13
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	15
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	25
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	31
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	37
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	44
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	56
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	64
Tabel 11.	Target dan capaian IK 9	68
Tabel 12.	Target dan capaian IK 10	69
Tabel 13.	Target dan capaian IK 11	76
Tabel 14.	Target dan capaian IK 12	80
Tabel 15.	Target dan capaian IK 13	81
Tabel 16.	Target dan capaian IK 14	82
Tabel 17.	Target dan capaian IK 15	83
Tabel 18.	Target dan capaian IK 16	89
Tabel 19.	Target dan capaian IK 17	90
Tabel 20.	Target dan capaian IK 18	93
Tabel 21.	Target dan capaian IK 19	95
Tabel 22.	Target dan capaian IK 20	96
Tabel 23.	Target dan capaian IK 21	97
Tabel 24.	Target dan capaian IK 22	98
Tabel 25.	Realisasi anggaran Direktorat Logistik	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termaktub dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik

telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi lingkup Direktorat Logistik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

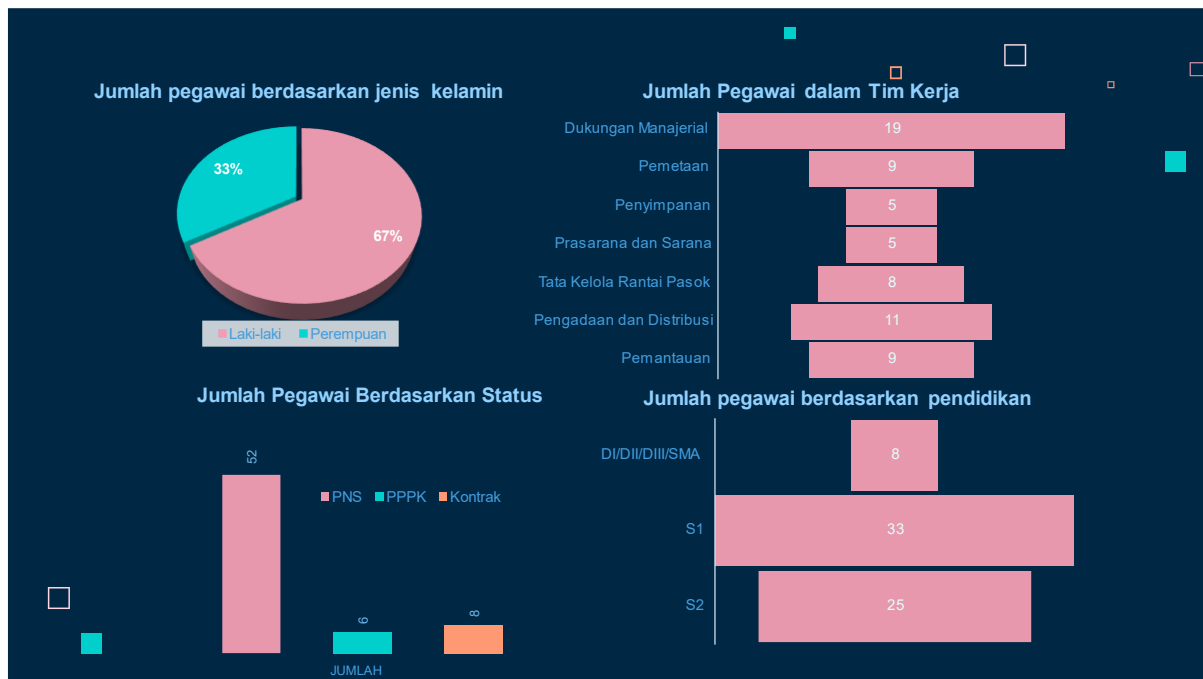
Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;
6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan I Tahun 2024, Direktorat Logistik memiliki total 66 pegawai, terdiri dari 44 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 52 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 25 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 19 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 11 orang, Timja Pemetaan dan Timja Pemantauan masing-masing memiliki 9 orang, dan Timja Tata Kelola Rantai Pasok serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 8 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Mismatch Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan I Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2024;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KKP Tahun 2020-2024 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Renstra tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 01/KEP-DJPDSPKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

VISI

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

MISI

Kedaulatan (Sovereignty):

mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SDKP, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keberlanjutan (Sustainability):

mewujudkan pengelolaan SDKP yang berkelanjutan.

Kesejahteraan (Prosperity):

mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.



dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2024 mempunyai 16 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Terkelolanya Koridor Logistik Hasil Perikanan; (2) Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA); (3) Tersedianya data dan informasi

logistik hasil KP; (4) Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok; (5) Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas; (6) Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP; (7) Tersedianya sarana penyimpanan produk KP; (8) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP; (9) Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha; (10) Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang; (11) Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan; (12) Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton; (13) Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku; (14) Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; (15) Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP; dan (16) Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran kegiatan yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran kegiatan memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Sehubungan

dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4
4.	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8
5.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas	5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5
6.	Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29
7.	Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15
8.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5
9.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha	9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5
10.	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10
11.	Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8
12.	Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
13.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100
15.	Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87
		17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80
		20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95

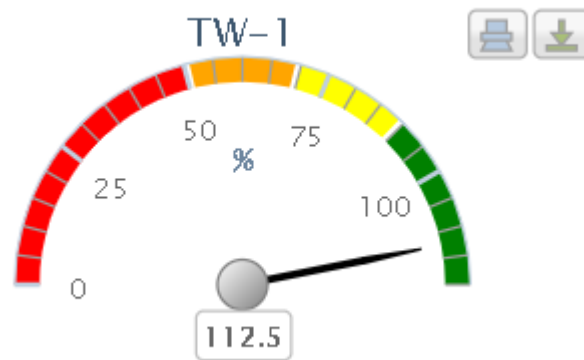
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2024 memiliki 22 indikator kinerja yang terdiri dari rincian 13 IKK bersifat tahunan, 7 IKK bersifat triwulan dan 2 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Maret 2024. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan I sebesar 112,5. Adanya peningkatan 3,91 poin atau 3,6% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, namun jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 11,15 poin atau 11% dari capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023.



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50

Gambar 2. Layar tangkap *dashboard* nilai capaian Triwulan I Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW 1 2024	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2024	TW I 2024		Tahun 2024	TW I 2024
1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5	-	-	-	-
2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1	-	-	-	-
3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4	-	-	-	-
4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8	-	-	-	-
5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5	-	-	-	-
6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29	5	7	24,13	140
7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15	-	-	-	-
8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5	-	-	-	-
9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5	-	-	-	-
10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10	2	2	20	100
11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8	-	-	-	-
12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4	-	-	-	-
13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287	-	-	-	-
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100	50	55	5	110

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW 1 2024	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2024	TW I 2024		Tahun 2024	TW I 2024
15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06	-	-	-	-
16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87	-	-	-	-
17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84	-	-	-	-
18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100	-	-	-	-
19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80	80	100	125	125
20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133	141,48	141,48
21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80	-	-	-	-
22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95	-	-	-	-

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai

dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2024 adalah 5 (lima) koridor logistik yang terkelola. Dalam matrik renaksi, pagu IKK ini sebesar Rp50.000.000,-. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Koridor Kendari – Surabaya/ Jakarta;
- 2) Koridor Makassar – Surabaya/ Jakarta;
- 3) Koridor Bitung – Surabaya/ Jakarta;
- 4) Koridor Ambon – Surabaya/ Jakarta;
- 5) Koridor Mimika – Surabaya /Jakarta

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini sudah tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dimana target tahun 2020 sd 2024 adalah 5 koridor logistik yang terkelola.

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola	-	5	-	5	-	5	-	-	-	100	-	-

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV, sehingga belum ada capaian di Triwulan 1 karena Pengelolaan koridor dilakukan sepanjang tahun/ tahunan. Bentuk pengelolaannya adalah pelaksanaan kegiatan pemetaan logistik, tata kelola

rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan pada koridor logistik. Sedangkan pelaporannya dilakukan pada Triwulan IV. Adanya persamaan jumlah target dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 5 koridor logistik yang terkelola atau 100% sesuai dengan target dalam renstra. Target ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 115/KEP-DJPDSPKP/2020 tentang Penetapan Koridor Logistik Perikanan pada Sistem Logistik Ikan Nasional dimana jumlah koridor logistik adalah 5 koridor.

3.2.2. Sasaran Kegiatan “Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah Sistem Ketertelusuran dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan. Target indikator tahun 2024 adalah 1 (satu) unit Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional yang diimplementasikan. Jumlah Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir, dan target tercapai pada Triwulan IV.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena

masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	-	1	-	1	-	1	-	-	-	100	-	-

Berdasarkan tabel 4. diatas, menunjukkan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV, sehingga belum ada capaian di Triwulan 1. Adanya persamaan jumlah target dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 1 unit Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan.

Kegiatan ini dilakukan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAN Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan dengan pagu awal sebesar Rp2.237.500.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp79.783.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Adanya anggaran bertagging PNPB sebesar Rp693.909.000,-, dan belum adanya capaian PNPB lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNPB belum dapat digunakan. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp37.828.623,- atau sebesar 1,69% dari pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan Sosialisasi STELINA dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 di Hotel Alana Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

b. Peserta:

Peserta yang diundang meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat, Asosiasi Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan, serta Pelaku Usaha sektor Kelautan dan Perikanan.

c. Tujuan Kegiatan:

Tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi STELINA adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam kepada pelaku usaha tentang pentingnya sistem ketertelusuran dalam rangka menjamin mutu dan keamanan produk perikanan serta memastikan ketertelusuran di seluruh rantai pasok melalui data dan informasi secara elektronik.

d. Hasil:

Kegiatan Sosialisasi STELINA terselenggara atas kerjasama Ditjen PDSPKP dengan *Marine Stewardship Council* (MSC). Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut antara lain *Programe Director Marine Stewardship Council* (MSC) dan Direktur Logistik serta Tim Kerja Pemantauan Dit. Logistik. Direktur Logistik menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan implementasi STELINA, sementara *Programe Director MSC* menjelaskan pentingnya perikanan berkelanjutan dan standar sertifikasi MSC CoC. Ketua Tim Kerja Pemantauan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2021 tentang STELINA dan tantangan dalam implementasinya.

e. Kesimpulan:

Kegiatan Sosialisasi STELINA merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang sistem ketertelusuran produk perikanan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan asosiasi penting untuk memastikan keberhasilan implementasi STELINA. Kesempatan untuk memberikan masukan terhadap peraturan dan aplikasi STELINA harus dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dokumentasi



Gambar 3. Sosialisasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional

- 2) Rapat koordinasi dengan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI)

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 di RR. Logistik Gedung Mina Bahari III Lantai 14 KKP.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP, perwakilan AP2HI, dan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemantauan Dit. Logistik.

c. Tujuan Kegiatan:

Tujuan rapat koordinasi adalah untuk menyelaraskan sistem ketertelusuran pada aplikasi dan regulasi STELINA dengan Standar Ketertelusuran yang dikeluarkan oleh Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

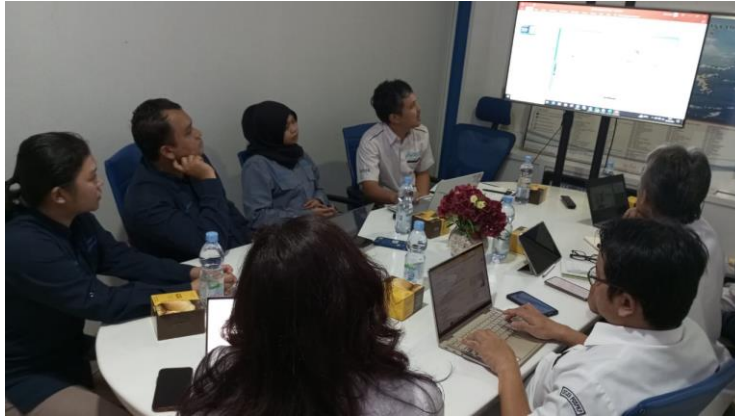
d. Hasil:

AP2HI merupakan asosiasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pole and line dan handline, dengan jumlah anggota sebanyak 54 anggota dan 33.000 tenaga kerja. AP2HI mengembangkan sistem informasi ketertelusuran sesuai standar GDST yang bisa digunakan gratis oleh member AP2HI, dan berharap sistem ini dapat terkoneksi dengan STELINA. AP2HI berharap adanya kerjasama dalam pengembangan aplikasi ketertelusuran yang dibangun oleh Ditjen PDSPKP maupun DJPT terkait dengan data logbook. AP2HI akan menginisiasi koordinasi peninjauan kerjasama antara GDST dengan Ditjen PDSPKP terkait dengan STELINA. AP2HI mengharapkan adanya panduan interkoneksi dengan aplikasi lainnya yang dibangun oleh instansi atau lembaga lainnya, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan data sharing system (DSS). Tantangan kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi STELINA terlihat dari jumlah pelaku usaha pengolahan yang telah mengakses STELINA sebanyak 282 pelaku usaha, sedangkan data UPI berSKP sebanyak 1.475 UPI.

e. Kesimpulan:

Rapat koordinasi dengan AP2HI merupakan langkah penting dalam penyelarasan sistem ketertelusuran pada aplikasi dan regulasi STELINA dengan Standar Ketertelusuran GDST. Kerjasama antar lembaga dan asosiasi perikanan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi STELINA dalam mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.

Dokumentasi



Gambar 4. Rapat koordinasi dengan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia

3) Pelatihan Rantai Pengawasan atau *Chain of Custody* (CoC)

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 di Hotel Aryaduta.

b. Peserta:

Peserta pelatihan terdiri dari perwakilan Bappenas, Kemenkomarves, Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, serta perwakilan Tim Kerja lingkup Dit. Logistik.

c. Tujuan Kegiatan:

Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan rantai pengawasan atau *Chain of Custody* (CoC) serta penerapannya dalam sistem ketertelusuran dan regulasi STELINA.

d. Hasil:

Materi pelatihan disampaikan oleh narasumber dari *Marine Stewardship Council* (MSC). MSC adalah organisasi nirlaba internasional yang mengatasi permasalahan perikanan yang tidak berkelanjutan dan menjaga pasokan makanan hasil laut masa depan. Standar MSC terdiri dari standar perikanan dan standar CoC, yang masing-masing memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi MSC. Proses sertifikasi standar perikanan dan standar CoC dilakukan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity Assessment Bodies) yang terdaftar dan memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap standar tersebut. Perusahaan yang telah memenuhi standar perikanan dan standar CoC MSC dapat mencantumkan label MSC pada kemasan produknya setelah berkoordinasi dengan *Marine Stewardship Council International Ltd* untuk pengurusan royalti. Produk yang telah memenuhi standar perikanan dan standar CoC MSC, serta menampilkan label MSC pada kemasannya, secara umum lebih diminati oleh konsumen, sehingga

harga produk juga dapat naik hingga sekitar 10% dari harga produk tanpa label MSC.

e. Kesimpulan:

Pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar rantai pengawasan/CoC MSC dan penerapannya dalam STELINA serta program kerja pada unit kerja masing-masing. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat mendorong daya saing produk perikanan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Dokumentasi



Gambar 5. Pelatihan Rantai Pengawasan atau *Chain of Custody*

4) Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Januari 2024, di Ruang Rapat Mimika GMB III Lantai 13.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh perwakilan Pusdatin, Ketua Tim Jasa, Penanggung jawab, dan anggota tim kerja Pemetaan.

c. Tujuan Kegiatan:

Tujuan rapat adalah mempersiapkan bahan dan materi Sosialisasi Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan.

d. Hasil:

Pembuatan bahan paparan untuk kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan, termasuk pembaruan dasar hukum, tujuan, kategori pelaku usaha, persyaratan umum dan khusus, sistem mekanisme, prosedur, pembiayaan, produk layanan, kontak, petugas pelayanan, dan penanganan pengaduan. Daftar perusahaan yang terdaftar pada OSS terkait Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan sebanyak 4 perusahaan. Persiapan materi publikasi media sosial melalui platform Instagram setiap 2 kali/bulan, dengan materi yang berbeda untuk dibuatkan bahan publikasi.

e. Kesimpulan:

Rapat ini berhasil mempersiapkan bahan dan materi Sosialisasi Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan. Materi yang disiapkan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada pelaku usaha terkait dengan prosedur dan persyaratan perizinan dalam jasa pasca panen penangkapan ikan.

Dokumentasi



Gambar 6. Rapat Persiapan Sosialisasi Perizinan Berusaha Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan

5) Sosialisasi Layanan Jasa Pasca Panen KBLI 03133 dan 03143 di Jakarta dan Karawang

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

- Jakarta: Dilaksanakan selama 2 (Dua) hari pada tanggal 22 - 23 Februari 2024 di DKI Jakarta.
- Karawang: Dilaksanakan selama 1 (Satu) hari pada tanggal 26 Februari 2024 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

b. Peserta:

- Jakarta: Dilakukan oleh perwakilan Pusdatin, Katimja, Penanggung jawab, dan anggota tim kerja Pemetaan.
- Karawang: Dilakukan oleh anggota tim kerja Pemetaan

c. Tujuan Kegiatan:

Memberikan sosialisasi layanan perizinan berusaha yang diampu Direktorat Logistik, yaitu KBLI 03133 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut dan KBLI 03143 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat

d. Hasil:

- Jakarta: Fokus sosialisasi kepada perusahaan PMA skala besar yang memiliki perizinan KBLI perikanan tangkap (031) di DKI Jakarta, kunjungan dilakukan ke PT. Dwi Bina Utama dan PT. Internasional Asia Pasifik Sinergi. Dalam kunjungan tersebut, dilakukan identifikasi kegiatan perusahaan dan mensosialisasikan layanan perizinan yang diampu Direktorat Logistik. PT. Dwi Bina Utama berencana untuk melakukan penambahan izin usaha KBLI 03133 pada akta perusahaan melalui notaris. Sementara PT. Internasional Asia Pasifik Sinergi belum berencana menambah kegiatan usaha yang masuk kategori KBLI 03133.
- Karawang: Sosialisasi kepada perusahaan PMA skala besar yang memiliki perizinan KBLI perikanan tangkap (031) di Jawa Barat, kunjungan dilakukan ke PT. Santex Food Indonesia. Tim bertemu dengan Direktur PT. Santex Food Indonesia (Tsai Shun Chi) yang merupakan warga negara RRC. Perusahaan ini memiliki bisnis utama dalam pembesaran/ranching Sidat (*Anguilla bicolor*, *Anguilla marmorata*). Perusahaan telah memiliki KBLI 46206 dan 03151, serta telah memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Perusahaan saat ini akan melakukan pengurusan SKP terkait pemasaran Sidat dan pengurusan HACCP untuk melaksanakan ekspor.

e. Kesimpulan:

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan layanan perizinan berusaha terkait pasca panen penangkapan ikan kepada perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor perikanan. Dari kunjungan tersebut, beberapa perusahaan telah menunjukkan minat untuk mengurus izin usaha tambahan yang sesuai dengan ketentuan KBLI 03133. Masukan dan saran dari pelaku usaha, antara lain, menyoroti perlunya praktik pengelolaan yang berkelanjutan, serta kemudahan dalam proses perizinan untuk mendukung pertumbuhan industri perikanan.

Diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha tentang prosedur perizinan yang berlaku dan memotivasi untuk melakukan ekspansi usaha yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada ketertelusuran dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Dokumentasi



Gambar 7. Sosialisasi Layanan Jasa Pasca Panen KBLI 03133 dan 03143

6) Monitoring dan Evaluasi Implementasi WMS

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat monitoring dan evaluasi WMS dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 secara daring dan luring. Rapat dipimpin oleh Ketua Timja Penyimpanan dan dihadiri oleh perwakilan Timja Data dan Pelayanan Setditjen PDSPKP, pengelola BP CS Direktorat Logistik, penerima GBP Direktorat Logistik, Katimja lingkup Direktorat Logistik, dan pelaksana Timja Penyimpanan.

b. Peserta:

Ketua Timja Penyimpanan, perwakilan Timja Data dan Pelayanan Setditjen PDSPKP, pengelola BP CS Direktorat Logistik, penerima GBP Direktorat Logistik, Katimja lingkup Direktorat Logistik, dan pelaksana Timja Penyimpanan.

c. Tujuan Kegiatan:

Rapat monitoring dan evaluasi WMS bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi Sistem Manajemen Gudang (WMS) dalam pendataan ikan di gudang beku, termasuk memudahkan perhitungan PNBP, memberikan pelaporan yang lengkap dan akurat, serta memudahkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

d. Hasil:

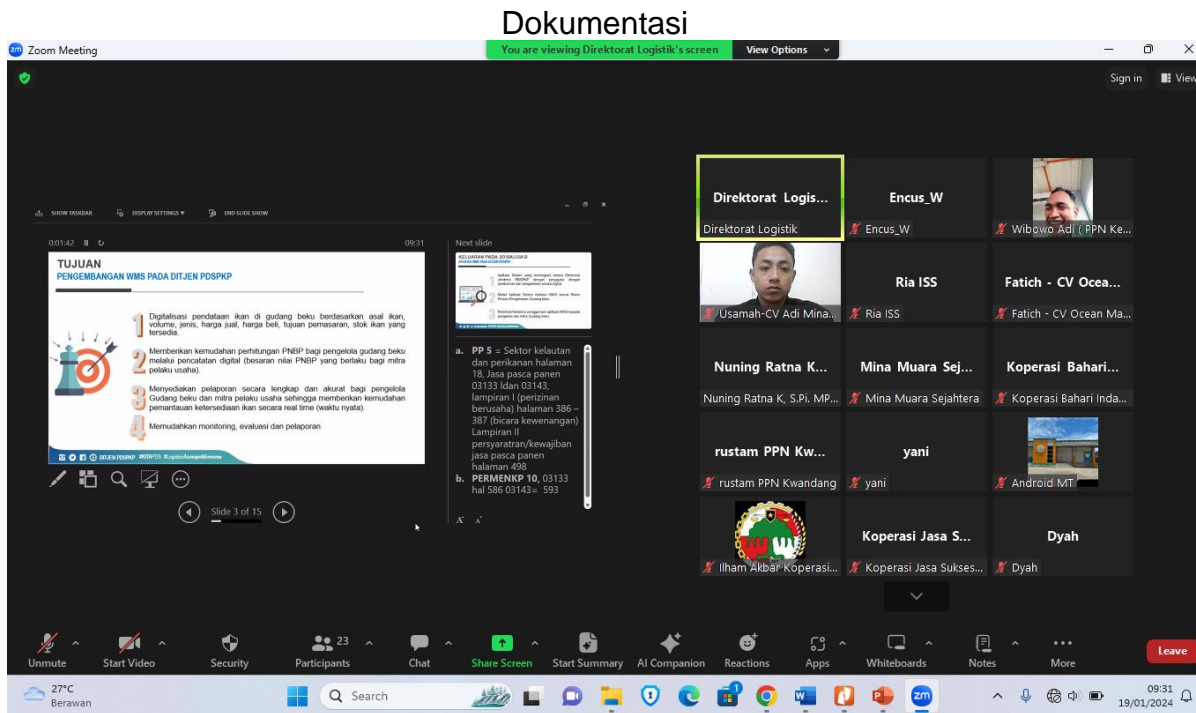
Pengisian WMS memerlukan effort dari pelaku usaha perikanan, termasuk kesediaan waktu, tenaga, dan piranti untuk input data berupa

HP berbasis Android. Terdapat beberapa kesalahan dalam pengisian data dan kendala teknis seperti eror ketika melakukan input data, kerusakan HP, dan duplikasi permintaan data. Ditemukan data yang kurang masuk akal, seperti utilitas lebih dari 100% yang mengindikasikan kesalahan input data atau keterlambatan input.

Dalam periode awal penggunaan WMS, hanya sedikit pelaku usaha yang aktif menginput data, dan diharapkan agar para pelaku usaha tetap aktif dalam menyampaikan data.

e. Kesimpulan:

Monitoring dan evaluasi WMS sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan efisien. Kendala teknis dan kesalahan input data perlu segera diatasi agar sistem WMS dapat berjalan dengan baik. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengisian data WMS. Pengembangan aplikasi WMS perlu dilakukan untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan data di masa mendatang.



Gambar 8. Monitoring dan Evaluasi Implementasi WMS

7) Evaluasi Aplikasi *Warehouse Management System* CSBP

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat Evaluasi *Warehouse Management System* (WMS) CSBP dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Jakarta.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja Penyimpanan dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Lingkup Direktorat Logistik dan perwakilan PT Hima Wisesa Manunggal sebagai pengembang aplikasi.

c. Tujuan Kegiatan:

Tujuan rapat evaluasi adalah untuk mengevaluasi kinerja dan penggunaan aplikasi WMS pada *Cold Storage/ Cold Storage Portable Bantuan Pemerintah (CSBP)*.

d. Hasil:

Pengguna aplikasi WMS per 20 Februari 2024 sebanyak 37 GB/GBP (53,62% dari total GB/GBP operasional) dengan total stok ikan sebanyak 3,06 ribu ton. Beberapa kendala dalam implementasi WMS antara lain lupa password, sinyal kurang bagus, pengelola CS lupa memasukkan jenis ikan secara detail, dan ketidaksesuaian data antara dashboard dan data di excel.

e. Kesimpulan:

Implementasi WMS pada CSBP telah mencapai tingkat partisipasi yang cukup baik dengan jumlah pengguna yang signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis dan operasional yang perlu segera ditangani, seperti masalah lupa password, kualitas sinyal yang tidak stabil, dan ketidaksesuaian data antara dashboard dan data di excel. Langkah-langkah perbaikan dan pemantauan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi pengelola CSBP.



Gambar 9. Evaluasi Aplikasi *Warehouse Management System CSBP*

3.2.3. Sasaran Kegiatan “Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)”

Definisi indikator ini adalah Jumlah data dan Informasi logistik hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi data pengukuran kinerja logistik, pemetaan, dan pemantauan ketersediaan dan kebutuhan ikan. Target indikator tahun 2024 adalah 4 (empat) data. Indikator ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan tercapai pada Triwulan IV. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan	-	2	-	4	-	2	-	-	-	100	-	-

Berdasarkan tabel 3. diatas, menunjukan bahwa pelaporan capaian dilaksanakan pada Triwulan IV, sehingga belum ada capaian di Triwulan 1. Adanya peningkatan jumlah target tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 2 data atau peningkatan 100%.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp318.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp138.997.396,- atau sebesar 13,89% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi Data *Cold Storage* Lingkup Direktorat Logistik

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat Koordinasi Data *Cold Storage* pertama dilaksanakan pada 3 Januari 2024 di Ruang Rapat Mimika, GMB III Lt.12. Rapat Koordinasi Data *Cold Storage* kedua dilaksanakan pada 5 Januari 2023 di ruang rapat Direktorat Logistik.

b. Peserta:

Rapat pertama dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan, dihadiri oleh perwakilan tim kerja lingkup Direktorat Logistik dan Ketua Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP. Rapat kedua dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan dihadiri oleh perwakilan tim kerja data dan layanan publik, Setditjen PDSPKP; tim kerja lingkup Direktorat Logistik dan internal tim kerja Pemetaan.

c. Tujuan Kegiatan:

Rapat pertama: *Review* data CS yang sudah di-cleansing, tindak lanjut dari hasil cleansing, dan mapping data CS.

Rapat kedua: *Review* data CS yang sudah di-cleansing, tindak lanjut dari hasil cleansing, dan mapping data CS.

d. Hasil:

Rapat pertama: Dibahas pemetaan data CS, pendefinisian kolom data, dan pengembangan sistem data center.

Rapat kedua: Dibahas tindak lanjut dari hasil cleansing data, pemutakhiran data gudang beku, analisis data pasokan ikan, dan pendefinisian kolom data.

e. Kesimpulan:

Implementasi WMS pada CSBP telah mencapai tingkat partisipasi yang baik, namun masih terdapat kendala teknis dan operasional yang perlu ditangani. Pemutakhiran data gudang beku dan pemetaan data CS menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan *Cold Storage*. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem pengelolaan data *Cold Storage*.

Dokumentasi



Gambar 10. Rapat Koordinasi Data *Cold Storage* Lingkup Direktorat Logistik

2) Rapat Penghitungan IKLI

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 melalui daring.

b. Peserta:

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP, Timja Pemetaan Direktorat Logistik, Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Logistik, Timja Tata Kelola Rantai Pasok Direktorat Logistik, Tim Kerja Pemantauan Direktorat Logistik, Tim Kerja Penyimpanan Direktorat Logistik dan Pelaksana Tim Kerja Pemetaan Direktorat Logistik.

c. Tujuan Kegiatan:

Mengukur performa logistik hasil perikanan dari titik asal Biak ke titik tujuan Surabaya dengan penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI).

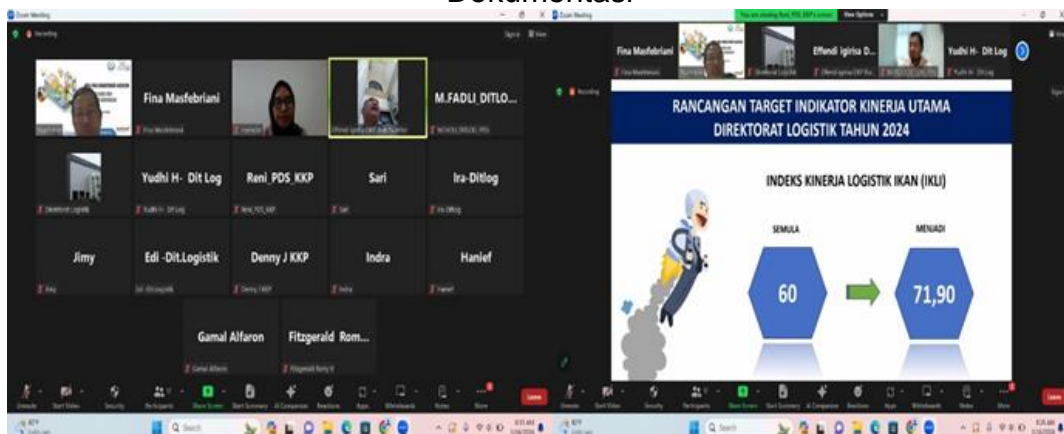
d. Hasil:

Pemaparan IKLI oleh ketua tim kerja Pemetaan. Diskusi tentang frekuensi koridor Biak-Surabaya, pola frekuensi pengiriman dan pelaku jasa logistik sebelum dan setelah *Soft Launching* ekosistem Koridor Biak-Surabaya, serta kondisi *Cold Storage* di Biak. Pembahasan tentang responden yang akan diwawancarai untuk mengukur IKLI, parameter yang diukur dalam kuisisioner, zonasi tol laut, dan persiapan perangkat IKLI dari enumerator. Tindak lanjut rapat berkoordinasi dengan DKP Biak terkait enumerator dan identifikasi pelaku usaha serta sosialisasi IKLI kepada semua enumerator yang telah ditetapkan.

e. Kesimpulan:

Pembahasan tentang IKLI sebagai alat monitoring pelaksanaan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) menunjukkan pentingnya evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik hasil perikanan. Pengukuran IKLI sebanyak dua kali setahun dengan kuisisioner yang disusun secara cermat dan melibatkan tenaga ahli merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan data yang akurat dan berdaya guna.

Dokumentasi



Gambar 11. Rapat Penghitungan IKLI

3) Rapat Harga Acuan Ikan (HAI)

a. Waktu dan Tempat:

Rapat Harga Acuan Ikan (HAI) dilaksanakan pada 1 Maret 2024 di Jakarta.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh tim penyusun HAI, Biro Hukum, Ditjen PT, Ditjen Logistik, serta beberapa pelabuhan termasuk PPS Nizam zachman, PPS Belawan, PP Mayangan, PP Muara Angke, dan PP Lekok.

c. Tujuan Kegiatan:

Rapat bertujuan untuk membahas perubahan HAI berdasarkan usulan dari beberapa pelabuhan, serta menetapkan prosedur, kriteria, dan formulasi perubahan HAI yang lebih efektif dan efisien.

d. Hasil:

Kronologis penyusunan HAI dari Harga Patokan Ikan (HPI) hingga Kepmen 199 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan. Penyusunan tim HAI dengan penugasan tertulis dalam SK, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP). Pembahasan mengenai prosedur, kriteria, dan formulasi HAI, termasuk penentuan waktu perubahan HAI berdasarkan musim dan analisis waktu perubahan harga di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Formula kenaikan dan penurunan HAI berdasarkan persentase deviasi harga yang paling banyak muncul (modus) di PIPP. Koordinasi dengan Ditjen PT terkait harga ikan yang wajar untuk mengatasi anomali harga pada data PIPP. Fokus perubahan HAI pada jenis ikan dan pelabuhan yang menyumbang PNBP terbesar.

e. Kesimpulan:

Rapat menghasilkan kesepakatan untuk memperbarui HAI berdasarkan usulan pelabuhan terkait, dengan prosedur, kriteria, dan formulasi yang telah disepakati untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan harga acuan ikan.

Dokumentasi



Gambar 12. Rapat Harga Acuan Ikan

4) Survey *Cold Storage* dan Harga Ikan

a. Waktu dan Tempat:

Survey dilakukan pada tanggal 7 Maret 2024 di Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta dan pada tanggal 8 Maret 2024 di PPP Bajomulyo, Pati Jawa Tengah.

b. Peserta:

Tim data Sesditjen PDSPKP, Bapak Mas'ud, Bapak Maryadi, Ibu Adisti, dan petugas TPI Juwana.

c. Tujuan Kegiatan:

Melakukan verifikasi data *Cold Storage* (CS) di DI Yogyakarta dan survei lapangan terhadap harga ikan dan produksi di PPP Bajomulyo, Pati Jawa Tengah.

d. Hasil:

Verifikasi data CS di DI Yogyakarta mengidentifikasi 2 unit CS yang tidak menampung hasil perikanan dan 2 unit lainnya yang berkaitan dengan hasil perikanan. Survey di PPP Bajomulyo menunjukkan peningkatan produksi ikan sebesar 1% dari Januari hingga Februari 2024, dengan produksi jenis ikan layang, siro, dan lemuru sebagai yang tertinggi. Harga rata-rata ikan layang stabil dengan kenaikan pada bulan Februari di TPI Juwana unit II.

Sumberdaya manusia petugas pencatatan harga di TPI Juwana berjumlah 21 orang dengan rata-rata pendataan 15 kapal per hari normal dan 25 kapal saat hari besar keagamaan negara. Capaian target PNBPN sebesar 48% selama 4 bulan dari target, 18% selama 2 bulan setengah PNBPN turun setelah Kepmen 199 tahun 2023. Usulan perubahan HAI dari TPI Juwana terkait harga ikan Tetengkek, Tonang, Remang, Remang putih (karang), dan Bawal.

e. Kesimpulan:

Survey menunjukkan adanya data anomali pada CS di DI Yogyakarta dan usulan perubahan HAI dari TPI Juwana terkait harga beberapa jenis ikan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pendataan dan penetapan harga acuan ikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen sumberdaya perikanan.

Dokumentasi



Gambar 13. Survey Cold Storage dan Harga Ikan

3.2.4. Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok”

Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Lembaga pengelola logistik ikan dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional perlu dilakukan pengembangan kelembagaan distribusi ikan meliputi : pembentukan kelompok kerja SLIN maupun penguatan peran Pelaku Usaha.

Kelompok Kerja SLIN terdiri dari Pusat (KKP) dan Daerah yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi dengan melibatkan pelaku usaha. Kelompok Kerja daerah/Lembaga pengelola daerah yang difasilitasi sebanyak 7 lembaga yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Lembaga pengelola logistik pusat yang difasilitasi dan melibatkan pelaku usaha dalam rangka penataan rantai pasok. Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok.

Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan belum ada capaian di Triwulan 1.

Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena

masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina	-	1	-	8	-	1	-	-	-	100	-	-

Berdasarkan tabel 6. diatas, menunjukkan bahwa belum ada capaian pada Triwulan 1. Adanya peningkatan jumlah target tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu penambahan target sebanyak 7 lembaga atau peningkatan 700%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada kegiatan TP Provinsi, sehingga terjadi penambahan output di pusat menjadi 7 lembaga daerah (provinsi) dan 1 lembaga pusat.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok dengan pagu awal sebesar Rp1.000.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp340.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp209.893.669,- atau sebesar 20,98% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1) Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP

a. Waktu dan Tempat:

Rapat penyiapan data dukung penetapan koridor SLIN Biak-Surabaya dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Februari 2024.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dengan narasumber Bapak Sugeng H. Wisudo. Hadir pula Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, Katimja Pengadaan dan Distribusi, serta perwakilan dari Tim Kerja: Pemetaan, Penyimpanan, Pemantauan, serta Prasarana dan Sarana.

c. Tujuan Rapat:

Pengembangan koridor logistik untuk mendukung program prioritas KKP dengan fokus pada penyiapan data dukung penetapan koridor SLIN Biak-Surabaya.

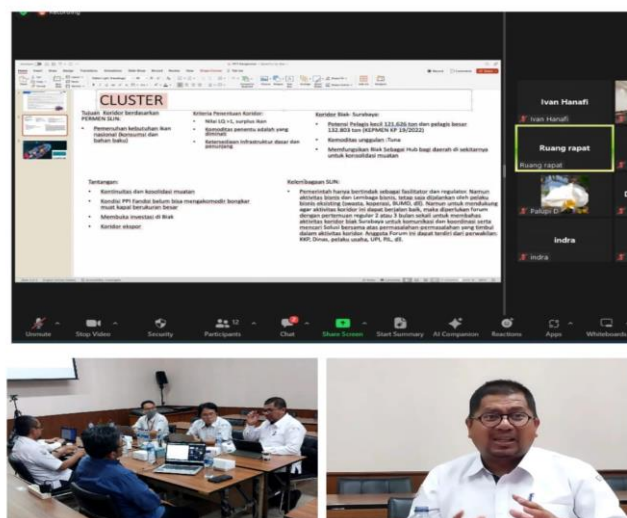
d. Hasil:

Potensi Biak sebagai Koridor Logistik Ikan: Produksi perikanan mencapai 127 ribu ton dengan komoditas utama: tuna, tenggiri, kerapu, kakap, dan biji nangka. Tantangan meliputi kontinuitas dan konsolidasi muatan, kondisi PPI Fandoi yang belum memadai, serta pembukaan iklim investasi dan ekspor langsung ke Narita. Peluang Penetapan Koridor Biak Surabaya: Potensi pelagis kecil 121.626 ton dan pelagis besar 132.803 ton (KEPMEN KP 19/2022). Memfungsikan Biak sebagai hub bagi daerah sekitarnya untuk konsolidasi muatan. Disarankan agar setiap koridor SLIN perlu dibuat forum (yang beranggotakan perwakilan KKP, Pemda, UPI, PJJ, Asosiasi, dll) untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan mencari solusi bersama dalam implementasi SLIN di masing-masing koridor.

e. Kesimpulan:

Rapat tersebut menyoroti potensi Biak sebagai koridor logistik ikan dengan berbagai komoditas unggulan dan tantangan yang perlu diatasi. Disarankan adanya forum kerja sama untuk mengatasi masalah dan memperkuat implementasi SLIN di koridor tersebut. Penguatan Peran Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk mendukung program prioritas KKP.

Dokumentasi



Gambar 14. Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP

2) Rapat Pembahasan Penyiapan Naskah Akademik Regulasi Penguatan Ekosistem Logistik Ikan Nasional

a. Waktu dan Tempat:

Rapat pembahasan penyiapan naskah akademik regulasi penguatan ekosistem logistik ikan nasional dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024, di Ruang Rapat Direktorat Logistik, lantai 12, Gedung Manggala Wanabhakti 3-KKP.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dengan tenaga ahli Bapak Kuncoro H. Widodo dari UGM. Hadir pula perwakilan dari Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik.

c. Tujuan Rapat:

Menyusun regulasi di lapangan yang mostly based on kewenangan Ditlog untuk menghindari zona kosong dan meminimalisir konflik, merumuskan terminologi yang tepat untuk Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI), menyiapkan regulasi terkait penugasan operator dan PSO untuk distribusi ikan dalam negeri, serta membahas isu utama terkait ketersediaan barang.

d. Hasil:

Ditlog ingin menyusun regulasi di lapangan yang berbasis pada kewenangannya sendiri untuk menghindari zona kosong dan meminimalisir konflik. Terminologi IKLI akan diganti menjadi Angka Kinerja Logistik Ikan (AKLI) untuk menghindari bentrok dengan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). Ditlog diminta untuk menyiapkan regulasi terkait penugasan operator dan PSO untuk distribusi ikan dalam negeri. Isu utama yang dibahas adalah ketersediaan barang. Perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi antara kapal tol laut dan kapal angkut umum maupun dengan pelabuhan perintis lainnya. Moda transportasi sebaiknya tidak menggunakan kapal angkut khusus ikan secara spesifik dari ujung ke ujung, namun lebih berfungsi sebagai kapal pengumpan dan pengisi kekosongan angkutan. Kapal angkut diinginkan berbentuk reefer container dengan kapasitas 2.500 ton. Perlu pemilahan antara Biaya Logistik Indonesia dan posisi logistik ikan. GLPI (Great Logistik Performance Indeks) menjadi perhatian. Disarankan untuk membuat target per tier per tahun agar dapat terukur dan tidak terlalu tinggi.

e. Kesimpulan:

Rapat tersebut menghasilkan rekomendasi untuk menyusun regulasi berbasis kewenangan Ditlog, mengganti terminologi IKLI menjadi AKLI, menyiapkan regulasi terkait penugasan operator dan PSO, serta melakukan sinergi antara kapal tol laut dan kapal angkut umum untuk efisiensi operasional

Dokumentasi



Gambar 15. Rapat Pembahasan Penyiapan Naskah Akademik Regulasi Penguatan Ekosistem Logistik Ikan Nasional

3) Rapat Penataan Regulasi Ekosistem Ikan Nasional

a. Waktu dan Tempat:

Rapat penataan regulasi ekosistem ikan nasional dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, dipimpin oleh Katimja TRP, di RR.Dirlog lantai 12, Gedung Manggala Wanabhakti 3-KKP.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh Pembina Mutu Utama Ditjen PDSPKP, Katimja Pemetaan Dit. Logistik, perwakilan dari Timja Hukum, Sesditjen PDSPKP, Koordinator Hukum dan Data Direktorat Logistik, serta Timja lingkup Direktorat Logistik.

c. Tujuan Rapat:

Rapat bertujuan untuk menjaring masukan/input terhadap penyusunan Naskah Akademik atau Surat Urgensi Perpres SLIN serta substansi yang akan terpotret dalam pasal-pasal Perpres dimaksud.

d. Hasil:

Ditemukan adanya tumpang tindih Program/Kegiatan dan Regulasi/kewenangan antar K/L, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Permen KP 58/2021, yang menyebabkan inefisiensi pengelolaan Logistik ikan nasional. Direktorat Logistik berencana mengajukan regulasi penguatan Logistik produk KP pada tahun 2025 melalui Perpres Logistik Ikan Nasional yang melibatkan semua pihak terkait dan Perpres penugasan operator dan PSO untuk distribusi ikan dalam negeri. Bagian Hukum sedang mengusulkan DIM RUU tentang perubahan atas UU No.32/2014 tentang kelautan sebagai acuan Perpres SLIN. Pembina Mutu Utama Ditjen PDSPKP menyoroti perlunya aturan yang lebih tinggi untuk SLIN agar dapat mengatur semua aspek yang mempengaruhi penataan dan pelaksanaan Logistik ikan nasional. Koordinator Hukum Direktorat Logistik menegaskan perlunya harmonisasi antara Perpres SLIN dengan DIM RUU Kelautan serta rancangan Perpres National Logistik *Ecosystem*. Koordinator Data Dit. Logistik mengusulkan agar SLIN dititipkan pada regulasi lain yang lebih tinggi seperti Ecosistem Logistik Nasional atau melalui UU Perikanan. Katimja Pemetaan menyoroti urgensi regulasi yang lebih tinggi dari Permen untuk memperkuat bisnis Logistik ikan dan mendukung pengelolaan pengadaan yang lebih baik.

e. Kesimpulan:

Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perlu adanya regulasi yang lebih tinggi dari Permen untuk mengatasi tumpang tindih Program/Kegiatan dan Regulasi/kewenangan antar K/L, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Logistik ikan nasional. Direktorat Logistik berencana untuk mengajukan Perpres Logistik Ikan Nasional dan Perpres penugasan operator dan PSO untuk distribusi ikan dalam negeri. Koordinator Hukum menegaskan perlunya harmonisasi antara Perpres SLIN dengan DIM RUU Kelautan serta rancangan Perpres National Logistik *Ecosystem*. Koordinator Data mengusulkan agar SLIN dititipkan pada regulasi lain yang lebih tinggi seperti Ecosistem Logistik Nasional atau melalui UU Perikanan. Katimja Pemetaan menyoroti urgensi regulasi yang lebih tinggi dari Permen untuk memperkuat bisnis Logistik ikan dan mendukung pengelolaan pengadaan yang lebih baik.

Dokumentasi



Gambar 16. Rapat Penataan Regulasi Ekosistem Ikan Nasional

3.2.5. Sasaran Kegiatan “Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas”

Indikator Kinerja Kegiatan “Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)”

Definisi indikator ini adalah Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas. Neraca Komoditas Perikanan merupakan data dan informasi yang memuat ketersediaan dan kebutuhan komoditas perikanan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Untuk acuan teknis, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KP No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Target indikator tahun 2023 adalah 1 (satu) rekomendasi Kebijakan. Rekomendasi Kebijakan mengenai pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan belum ada capaian pada Triwulan 1. Indikator

kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	-	1	-	5	-	1	-	-	-	100	-	-

Berdasarkan tabel 7. diatas, menunjukkan bahwa belum ada capaian pada Triwulan I karena masih proses pengumpulan, verifikasi dan pembahasan data sehingga direncanakan terdapat capaian pada Triwulan II. Adanya peningkatan jumlah target tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu penambahan target sebanyak 4 rekomendasi atau peningkatan 400%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat penambahan Rekomendasi sesuai dengan kebutuhan penyusunan Neraca Komoditas, Adapun 5 rekomendasi yang ditargetnya sebagai berikut :

1. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pelumatan tahun 2025
2. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku umpan tahun 2025
3. Analisis ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan untuk Horekapasmod dan pereduksian/bahan pengayaan makanan tahun 2025
4. Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pemindangan tahun 2025
5. Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Neraca Komoditas tahun 2025

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu awal sebesar Rp1.250.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp454.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti,-.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp123.596.146,- atau sebesar 9,89% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1) Rapat Pembahasan Integrasi Akun Sistem Inhouse NK Perikanan dan Pembahasan Pengembangan Sistem Inhouse NK Perikanan

a. Waktu dan Tempat:

Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024, bertempat di RR. Cakalang, Gedung Manggala Wanabhakti III lantai 1 KKP. Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024, dengan lokasi dan waktu yang sama.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Tindakan Karantina Ikan, Deputi Bagian Karantina Ikan, Badan Karantina Indonesia, Perwakilan Pusat Pengendalian Mutu, BBP2MHKP, Perwakilan Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, BP2MHKP, Perwakilan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Perwakilan Timja Pemantauan, Dit. Logistik, serta anggota Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit. Logistik.

c. Tujuan Rapat:

Rapat bertujuan untuk membahas integrasi akun sistem inhouse NK perikanan dengan PSDKP, Karantina, dan Stelina, serta pengembangan data dan perbaikan sistem di sistem NK perikanan.

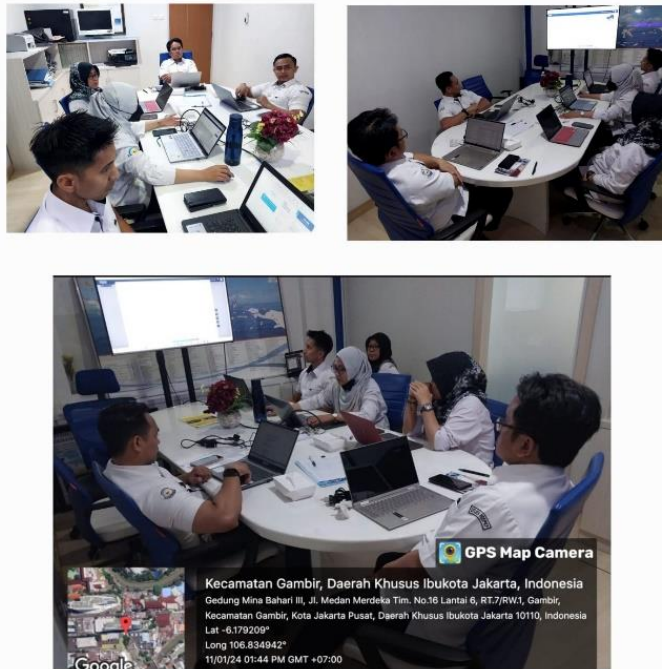
d. Hasil Rapat:

Terdapat 31 perusahaan yang mengajukan permohonan integrasi akun, namun hanya 22 perusahaan yang merespon permohonan dokumen yang diminta. Dari 22 perusahaan yang merespon, 6 perusahaan diterima akses integrasinya karena dokumen yang disampaikan sudah lengkap, 9 perusahaan ditolak pemberian aksesnya, 2 perusahaan mengundurkan diri, dan 5 perusahaan diminta untuk menyampaikan dokumen tambahan. Rapat pembahasan integrasi akun sistem inhouse NK perikanan membahas pengawasan impor di Karantina, integrasi data impor di Sisterkaroline, dan listing kebutuhan data yang diperlukan.

e. Kesimpulan:

Rapat pembahasan integrasi akun sistem inhouse NK perikanan dan pembahasan pengembangan sistem inhouse NK perikanan menghasilkan kesimpulan bahwa perlu dilakukan koordinasi internal masing-masing instansi untuk menginventarisir data dan elemen data yang bisa diintegrasikan. Rapat lebih lanjut akan dilakukan untuk membahas secara lebih teknis mengenai integrasi akun sistem inhouse NK perikanan.

Dokumentasi



Gambar 17. Rapat Pembahasan Integrasi Akun Sistem Inhouse NK Perikanan dan Pembahasan Pengembangan Sistem Inhouse NK Perikanan

2) Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan dan Rapat Koordinasi Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan di Sumatera Utara

a. Waktu dan Tempat:

Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024, di ruang rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari III lantai 1 KKP. Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024, di Jakarta.

b. Peserta:

Rapat pertama dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Direktorat Logistik, Anggota Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Anggota Tim Dukungan Manajerial Direktorat Logistik, dan Pak Purwanto. Rapat kedua dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Tim Kerja Pemetaan Direktorat Logistik, dan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Direktorat Logistik.

c. Tujuan Rapat:

Rapat pertama bertujuan untuk membahas rencana penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pemindangan. Rapat kedua bertujuan

untuk mengkonfirmasi kebutuhan bahan baku pemindangan di Sumatera Utara, jumlah kebutuhannya, jenis ikan yang digunakan, dan kondisi pasokan di Sumatera Utara.

d. Hasil Rapat:

Rapat pertama menghasilkan rencana penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pemindangan, dengan output berupa 3 analisis yang berbeda.

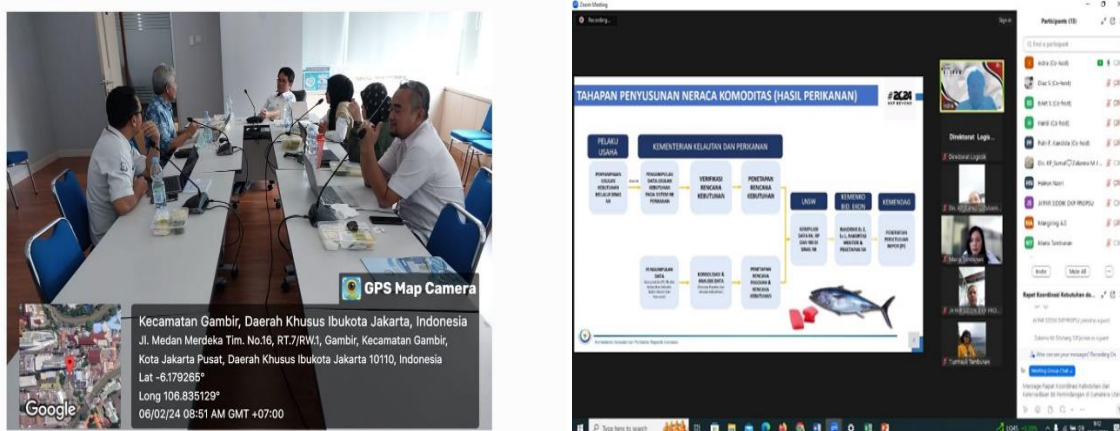
Rapat kedua menghasilkan beberapa hasil pembahasan, antara lain:

- Data persetujuan impor (PI) dan realisasi impor tahun 2024 per jenis penggunaan.
- Alokasi permohonan impor perubahan untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.
- Informasi kebutuhan bahan baku pemindangan dari beberapa daerah di Sumatera Utara.
- Kendala-kendala terkait harga dan pasokan bahan baku pemindangan di Sumatera Utara.
- Perlunya koordinasi yang lebih baik antara pelaku usaha, importir, dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemindangan yang memadai dan stabil di Sumatera Utara.

e. Kesimpulan:

Rapat pembahasan rencana penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pemindangan serta rapat koordinasi kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pemindangan di Sumatera Utara menghasilkan kesimpulan bahwa perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan baku pemindangan yang memadai dan stabil di Sumatera Utara.

Dokumentasi



Gambar 18. Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan

3) Laporan Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan verifikasi dilaksanakan secara daring pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 13.30, tanggal 4 Maret 2024 pukul 09.00, tanggal 5 Maret 2024 pukul 13.00, dan tanggal 6 Maret 2024 pukul 13.00.

b. Peserta

Koordinator Kelompok Tata Kelola Rantai Pasok dan tim verifikasi yang terdiri dari perwakilan Direktorat Logistik, Perwakilan Setdijen PDSPKP, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Kepala Pusat Karantina Ikan, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Direktur Pemasaran, Direktur Usaha dan Investasi, serta perwakilan tim dari perusahaan yang mengajukan perubahan RK.

c. Tujuan Kegiatan

Kegiatan dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan tahun 2024 yang disampaikan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) pada Sistem INSW.

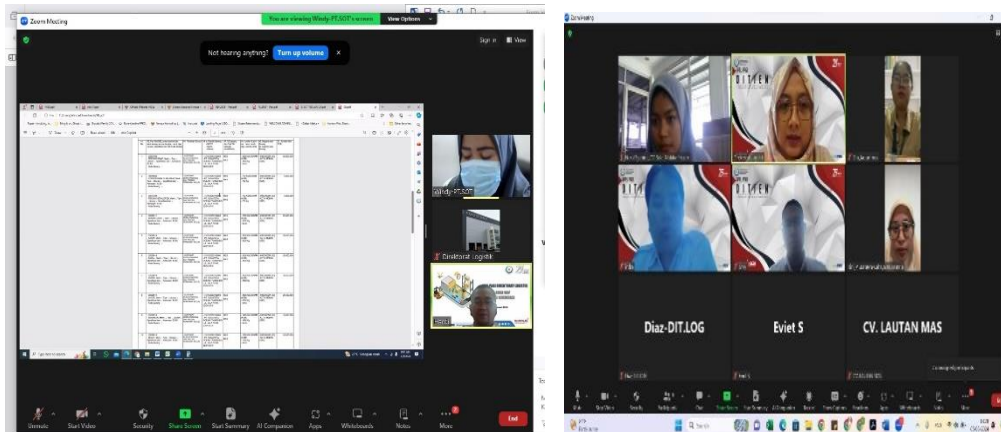
d. Hasil Verifikasi

- Pada tanggal 1 Maret 2024, terdapat 2 perusahaan yang diverifikasi, namun ada kekurangan dokumen yang harus diperbaiki.
- Pada tanggal 4 Maret 2024, 2 perusahaan telah diverifikasi dan selesai untuk verifikasi dokumen serta penandatanganan pakta integritas. Perusahaan diminta untuk menyampaikan kekurangan dokumen dan memperbaiki usulan pada aplikasi SINAS NK.
- Pada tanggal 5 Maret 2024, 6 perusahaan hadir dan selesai untuk verifikasi dokumen dan penandatanganan pakta integritas. Perusahaan diminta untuk menyampaikan kekurangan dokumen dan memperbaiki usulan pada aplikasi SINAS NK.
- Pada tanggal 6 Maret 2024, 11 perusahaan hadir dan selesai untuk verifikasi dokumen dan penandatanganan pakta integritas. Perusahaan diminta untuk menyampaikan kekurangan dokumen dan memperbaiki usulan pada aplikasi SINAS NK.

e. Kesimpulan

Kegiatan verifikasi pengajuan perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan tahun 2024 telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 1, 4, 5, dan 6 Maret 2024. Sebanyak 21 perusahaan telah diverifikasi dan diminta untuk memperbaiki kekurangan dokumen serta usulan perubahan pada aplikasi SINAS NK. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian usulan perubahan RK sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Dokumentasi



Gambar 19. Laporan Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2024

3.2.6. Sasaran Kegiatan “Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)”

Definisi indikator ini adalah Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Supplier/pengepul, pengolah/industri pengolahan) dengan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kerjasama pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan antara operator utama, operator pendukung dan pelaku usaha di bidang perikanan baik dalam bentuk kelompok usaha, koperasi maupun badan usaha dalam menjamin serapan ikan di hulu serta menjamin ketersediaan ikan bagi konsumsi dan industri

pengolahan ikan termasuk penerapan sistem manajemen gudang beku (ikan keluar, ikan masuk, dan jenis ikan).

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Pada tahun 2023, dibagi menjadi 2 IKK yaitu Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil KP dan IKK Pelaku usaha KP yang dimitrakan dalam rangka distribusi hasil perikanan. Sedangkan tahun 2024 IKK tersebut digabung satu yaitu Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan). Adanya penurunan target dan anggaran di tahun 2024 sebesar 12 kesepakatan dari target tahun 2023 yaitu sebesar 41 kesepakatan. Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan target sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar 5 Kesepakatan.

Capaian sampai dengan Triwulan I adalah sebesar 7 Kesepakatan atau 140% dari target Triwulan I tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya efektifitas dan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, dimana dalam satu kegiatan dapat menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun demikian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama mengalami penurunan sebesar 1 kesepakatan hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran dan blokir anggaran melalui *automatic adjustment* pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian sampai dengan Triwulan I telah mencapai 24,13%. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tujuan kesepakatan dalam rangka pengadaan yaitu menjamin keberlangsungan pengadaan, meningkatkan efisiensi pengadaan dan menerapkan sistem rantai dingin saat pengadaan ikan. Tujuan kesepakatan dalam rangka distribusi yaitu menjamin keberlangsungan distribusi dan transportasi, meningkatkan efisiensi distribusi dan transportasi dan menerapkan sistem rantai dingin saat distribusi. Sedangkan Tujuan kesepakatan dalam rangka penyimpanan yaitu melakukan penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem rantai dingin, penggunaan aplikasi *Warehouse Management System* dan melakukan penetapan harga jasa simpan ikan.

Adapun kesepakatan yang terbentuk sebagai berikut :

- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan Kurniawan Kasno dalam rangka Pengadaan
- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan PT Pindad *International* Logistik dalam rangka Distribusi

- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan PT SPIL Cab. Biak dalam rangka Distribusi
- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dengan Pengolah Ikan Asin Kering (Damin) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dengan Pengolah Ikan Asin Kering (Edi) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang dengan Pengolah Ikan (Nurjaman) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang dengan Pengolah Ikan (Simin Butolo) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	5	41	8	29	7	41	8	7	140	100	100	24,13

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dengan pagu awal sebesar Rp1.160.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp329.900.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 475.725.767,- atau sebesar 41,01% terhadap pagu. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan
 - a. Waktu dan Tempat:

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024, di Bogor.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Perancang PUU Ahli Utama Kemenkumham dan dihadiri oleh Sesditjen PDS, Direktur Logistik, perwakilan Kemenkumham, Setkab, Biro Hukum, BSDMAO, Set BP2MHKP dan Pusat PM BP2MHKP, Itjen, Dit UI, Dit Pemasaran, Dit PBM, dan pelaku usaha (AP Log, Kalog, Garuda Indonesia, Pelni, PT. BGR).

c. Tujuan Rapat:

Rapat bertujuan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

d. Hasil Rapat:

Beberapa hasil yang dicapai antara lain penyesuaian judul menjadi "Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan", penambahan muatan/materi, menghapus, dan mereformulasi beberapa pasal pada batang tubuh dengan mengacu pada kaidah penyusunan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan di lapangan. PerMenKP tersebut akan berlaku setelah 6 bulan sejak tanggal diundangkan dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, pelaku usaha, dan kondisi politik dalam negeri saat ini.

e. Kesimpulan:

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan telah menghasilkan beberapa penyesuaian yang signifikan pada rancangan PerMenKP tersebut, termasuk penyesuaian judul, penambahan muatan/materi, dan pematapan konsepsi. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa isu yang masih perlu dikecaskan, seperti pengaturan peralihan KBLI dari SKP ke SPDI.

Dokumentasi



Gambar 20. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan

2) Pelaksanaan *Soft Launching* Ekosistem Logistik Hasil Perikanan Zona II Penangkapan Ikan Terukur Koridor Biak – Surabaya

a. Waktu dan Tempat:

Soft Launching Ekosistem Logistik Hasil Perikanan Zona II Penangkapan Ikan Terukur Koridor Biak – Surabaya berlangsung pada tanggal 26 Januari 2024 di Pelabuhan Indonesia, Biak.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Wakil Bupati Kabupaten Biak, perwakilan dari PT Rahayu Perdana Trans, PT Salam Pacific Indonesia Line, PT Pindad, dan Pemilik Kapal Lucky Star Pasifik.

c. Tujuan:

Rapat bertujuan untuk meluncurkan ekosistem logistik hasil perikanan Zona II Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya optimalisasi rantai pasok hasil perikanan, serta memperkuat pembangunan perikanan di Tanah Papua.

d. Hasil:

Dilakukan pengiriman ikan sebanyak 50 kontainer ekuivalen dengan 750 ton di bawah koordinasi PT. Pindad *International* Logistik (PT. PIL). Penandatanganan kesepakatan bersama antara PT. PIL, HSN Group melalui PT Rukma Padaya Trans (PT. RPT), PT. Salam Pasific Indonesia Lines (PT. SPIL), dan Pengurus Kapal Penangkap Ikan sebagai bagian dari *Soft Launching*. Migration 21 kapal penangkap ikan ke Zona II PIT sejak November

2023 telah mendukung peningkatan pengiriman ikan dari Kabupaten Biak Numfor. Layanan pengiriman muatan berpendingin antar pulau oleh PT. RPT mengalami peningkatan signifikan dalam 5 bulan terakhir. Persiapan untuk ekspor Biak – Narita (Jepang) dijadwalkan minggu ke-3 bulan Februari 2024 dengan dukungan Ditjen PDSPKP, PT. PIL, dan PT. Pos Logistik. Telah dilaksanakan penandatanganan 3 kesepakatan yaitu :

- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan Kurniawan Kasno dalam rangka Pengadaan
- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan PT Pindad *International* Logistik dalam rangka Distribusi
- Kesepakatan antara PT Rahayu Perdana Trans dengan PT SPIL Cab. Biak dalam rangka Distribusi

e. Kesimpulan:

Penguatan sistem logistik ikan di Zona II, khususnya Papua, diharapkan mendorong pertumbuhan industri sektor kelautan dan perikanan di Indonesia Timur sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru. Kerja sama antara pemerintah, PT. PIL, dan PT. Pos Logistik diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor perikanan di wilayah tersebut.

Dokumentasi



Gambar 21. Pelaksanaan *Soft Launching* Ekosistem Logistik Hasil Perikanan Zona II Penangkapan Ikan Terukur Koridor Biak – Surabaya

3) Rapat *Brainstorming* Penerapan CDIB dan Persiapan Penerapan Permen KP tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan

a. Waktu dan Tempat:

Rapat *Brainstorming* Penerapan CDIB dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024, di Jakarta. Sementara itu, Persiapan Penerapan Permen KP tentang

Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024, di Jakarta.

b. Peserta:

Rapat *Brainstorming* dihadiri oleh Ibu Novia Priyana (*Quality Infrastructure Expert*, GQSP Indonesia), Katimja Prasarana dan Sarana, Katimja Pemetaan, Perwakilan dari masing-masing Timja Pengadaan dan Distribusi, Timja Pemantauan, Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Timja Penyimpanan, Timja Dukungan Manajerial. Sementara itu, Persiapan Penerapan Permen KP dihadiri oleh Perwakilan Pusat Pengendalian Mutu-BPPMHKP, dan Perwakilan Timja lingkup Dit. Logistik.

c. Tujuan Rapat:

Rapat *Brainstorming* bertujuan untuk melakukan *Brainstorming* terkait penerapan CDIB (Cara Distribusi Ikan yang Baik) dengan mempertimbangkan praktik terbaik dan standar internasional. Sementara itu, rapat Persiapan Penerapan Permen KP bertujuan untuk membahas template panduan CDIB sesuai prinsip HACCP.

d. Hasil Rapat:

Beberapa hasil yang dibahas dalam Rapat *Brainstorming* antara lain adalah penerapan CDIB di berbagai negara, penerapan HACCP pada CDIB, penilaian CDIB, dan penyempurnaan outline pedoman. Terdapat juga pembahasan mengenai format panduan mutu di unit usaha yang selaras dengan HACCP. Hasil Pembahasan dalam rapat Persiapan Penerapan Permen KP antara lain akan disusun template Panduan CDIB yang sesuai prinsip HACCP, meliputi Cover, Lembar Pengesahan, Latar Belakang, HACCP, Pelabelan, Penanganan Keluhan Konsumen, Pelatihan Karyawan, dan Amandemen.

e. Kesimpulan:

Rapat *Brainstorming* Penerapan CDIB dan Persiapan Penerapan Permen KP telah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan CDIB di berbagai negara, penerapan HACCP pada CDIB, serta penilaian dan penyempurnaan outline pedoman. Rapat-rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun pedoman yang komprehensif untuk penerapan CDIB dalam distribusi ikan yang baik.

Dokumentasi



Gambar 22. Rapat *Brainstorming* Penerapan CDIB dan Persiapan Penerapan Permen KP tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan

4) Koordinasi Pengembangan Ekosistem Logistik Hasil Perikanan di Kabupaten Biak Numfor

a. Waktu dan Tempat:

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024 di Sasana Krida, Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor dan dihadiri oleh Asisten I Sekda, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA (BAPPEDA), Kepala Bidang Aset (BPKAD), Ketua Tim Kerja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Logistik, serta Penanggung Jawab Pengadaan Timja Pengadaan dan Distribusi Direktorat Logistik.

c. Tujuan:

Membahas Rencana Pembangunan Gudang Beku 2000 Ton di Kabupaten Biak Numfor dan Persiapan Grand Launching Ekspor Langsung Biak – Narita untuk Komoditas Tuna Segar.

d. Hasil:

Kesepakatan untuk fokus pembangunan gudang beku 2.000 ton di lahan Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan fasilitas pendukung yang memadai. Penyusunan mekanisme hibah untuk pembangunan gudang beku dengan rekomendasi menggunakan mekanisme Hibah. Penundaan rencana ekspor langsung akibat kondisi cuaca buruk dan ketidakpastian terkait jumlah muatan dan harga. Penentuan pelaksanaan Grand Launching Ekspor Langsung Biak – Narita menunggu pertemuan antara pihak terkait.

e. Kesimpulan:

Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor mendukung pembangunan gudang beku dan pelaksanaan grand launching ekspor. Pihak terkait diminta memantapkan kesiapan acara sebelum tanggal pelaksanaan sesuai arahan dari Jakarta.

Dokumentasi



Gambar 23. Koordinasi Pengembangan Ekosistem Logistik Hasil Perikanan di Kabupaten Biak Numfor

5) Persiapan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Zona II, Bali

a. Waktu dan Tempat:

Rapat persiapan implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Zona II dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024. Kegiatan berlangsung secara hybrid di Kantor Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Benoa, serta melalui zoom meeting.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Direktur Logistik dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor,

perwakilan Direktorat Kenelayanan dan Perizinan DJPT, perwakilan Eselon II lingkup DJPDSPKP, anggota ATLI pemilik kapal penangkap ikan (Tuna), dan Unit Pengolahan Ikan (Tuna).

c. Tujuan:

Mensosialisasikan ekosistem logistik hasil perikanan di Zona II PIT dan mendapatkan dukungan anggota ATLI terkait kegiatan Grand Launching Ekspor Langsung Hasil Perikanan Biak – Narita yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024.

d. Hasil:

Data DJPT menunjukkan adanya 232 unit kapal izin pusat dengan pangkalan PP Fandoi Biak. Keterbatasan muatan ekspor langsung Biak-Narita disebabkan oleh jumlah kapal tangkap yang terbatas. Tantangan pengiriman tuna segar meliputi kuantitas, kontinuitas, konsolidasi muatan, ketersediaan ABK, dukungan perbekalan, BBM, sarana, prasarana, dan handling ikan. Penyampaian materi terkait Persyaratan Mutu Dan Keamanan Komoditas Tuna Berdasarkan SNI Produk Perikanan. Penolakan impor produk tuna dari Indonesia ke Jepang hanya terjadi satu kali dalam 3 tahun terakhir.

e. Kesimpulan:

Anggota ATLI mengapresiasi usaha pemerintah dalam mengembangkan ekosistem logistik hasil perikanan zona II penangkapan ikan terukur koridor Biak – Narita. Penyusunan strategi yang melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku usaha di PU Benoa Bali dinilai penting untuk meningkatkan daya saing dan kelancaran ekspor hasil perikanan Biak ke Jepang.

Dokumentasi



Gambar 24. Persiapan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Zona II

6) Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia, Jakarta

a. Waktu dan Tempat:

Rapat pembahasan rencana kerja sama dengan PT Pos Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024 di Jakarta.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja PD, dihadiri oleh Executive General Manager, Manajer Retail, Manajer Korporasi PT Pos Indonesia, PIC dari Pos Indonesia untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Timja Penyimpanan, Timja TRP, Timja Pemetaan, dan Timja Dukman.

c. Tujuan:

Menjajaki kerja sama distribusi hasil kelautan dan perikanan menggunakan layanan PT Pos Indonesia, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Pos Indonesia.

d. Hasil:

Fokus kerja sama dengan PT Pos Indonesia adalah dukungan distribusi produk UMKM hasil kelautan dan perikanan. Layanan "O-Ranger Pos Aja Drop Point" disorot sebagai solusi untuk mendukung distribusi UMKM, dengan manfaat fee/imbal jasa bagi para pengguna. Penyediaan layanan pengiriman ikan segar dan beku oleh PT Pos Logistik akan dikaji, meskipun saat ini pengiriman ikan hidup belum dapat dilakukan oleh PT Pos. Usaha dilakukan agar produk UMKM dari sektor perikanan memperoleh tarif khusus untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar. Direktorat Logistik mengusulkan uji coba program O'ranger kepada UMKM binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menguji efektivitas pengiriman.

e. Kesimpulan:

Perlu merumuskan Perjanjian Kerja Sama turunan dengan PT Pos Indonesia melalui kerjasama Setditjen PDSPKP. Rencana uji coba program O'ranger kepada UMKM produk hasil Kelautan dan Perikanan akan dibahas lebih lanjut. PT Pos akan mengkoordinasikan program khusus untuk UMKM Perikanan sebagai bentuk dukungan pada sektor UMKM dengan bimbingan dari KKP dan kerja sama dengan PT Pos.

Dokumentasi



Gambar 25. Pembahasan Rencana Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia

7) Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku Bantuan Pemerintah di Provinsi Gorontalo

a. Waktu dan Tempat:

Monitoring pemanfaatan gudang beku bantuan pemerintah, implementasi WMS, dan pendampingan penerapan kelayakan pengolahan gudang beku di Provinsi Gorontalo dilakukan pada tanggal 6-8 Maret 2024.

b. Peserta:

Rapat melibatkan Kepala PPN Kwandang, Tim Kerta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha PPN Kwandang, CV. Sela Abadi, Bapak Rusban dari Suplayer PT. Fresh on Time Seafood, Pengelola *Cold Storage*, Direktorat Logistik, Poklahsar Thomaru 69 Patuhu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pahuwato beserta jajarannya.

c. Tujuan:

Tujuan rapat adalah untuk melakukan monitoring pemanfaatan gudang beku bantuan pemerintah, implementasi WMS, dan pendampingan penerapan kelayakan pengolahan gudang beku di Provinsi Gorontalo guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyimpanan ikan hasil tangkapan.

d. Hasil:

PPN Kwandang memiliki Gudang Beku Kapasitas 100 ton dan ABF Kapasitas 15 ton yang membutuhkan beberapa perbaikan, serta telah berkolaborasi

dengan mitra seperti CV. Sela Abadi dan Bapak Rusban untuk memaksimalkan penggunaan gudang beku. CV. Sela Abadi dan Bapak Rusban aktif dalam penggunaan CS dan ABF di PPN Kwandang untuk penyimpanan ikan sebelum dikirim ke pasar, di mana sebelumnya menggunakan coolbox. Poklhasr Thomaru 69 Patuhu di Kabupaten Pahuwato berhasil memanfaatkan CS dan ABF untuk menyimpan udang dan bandeng, dengan rencana pengembangan pembuatan CS 50 ton. Terdapat progres dalam penerapan kelayakan pengolahan gudang beku, namun masih memerlukan pendampingan dalam implementasi WMS. Dalam kegiatan ini juga terlaksananya 2 kesepakatan yaitu :

- Kesepakatan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang dengan Pengolah Ikan (Nurjaman) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang dengan Pengolah Ikan (Simin Butolo) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan

e. Kesimpulan:

Rapat monitoring menunjukkan upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan gudang beku di Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada Kolaborasi antara pengelola, mitra, dan pihak terkait. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan dan penyimpanan ikan di gudang beku.

Dokumentasi



Gambar 26. Monitoring Pemanfaatan Gudang Beku Bantuan Pemerintah di Provinsi Gorontalo

8) Persiapan Peresmian Kalamo di Kota Bandar Lampung

a. Waktu dan Tempat:

Perjalanan dinas ke Kota Bandar Lampung berlangsung pada tanggal 31 Januari – 2 Februari 2024 untuk persiapan peresmian Kalamo.

b. Peserta:

Kunjungan lapangan dihadiri oleh Stafsus MKP, Perwakilan PDS, DJPT, DKP Provinsi Lampung, dan DKP Kota Bandar Lampung.

c. Tujuan:

Tujuan perjalanan dinas adalah untuk melakukan pendampingan kunjungan stafsus guna persiapan peresmian Kalamo dan pemantauan kondisi sarana dan langkah pemanfaatan yang dilakukan.

d. Hasil:

Stafsus melakukan kunjungan ke sarana penyimpanan dingin ikan teri yang saat itu terisi produk sebanyak 7 ton, dengan beberapa produk telah dikirimkan sebelumnya ke daerah Kapuk Jakarta. Diskusi dengan koperasi dilakukan, mencakup pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana koperasi, peningkatan kualitas produk untuk pasar ekspor, replikasi rumah pengering ikan teri untuk peningkatan kualitas. Direktorat Logistik memfasilitasi pengadaan karton 1000 pcs untuk peresmian yang sudah tiba di lokasi. Arahan stafsus mencakup upaya memperluas akses pasar dengan kerjasama off taker, rencana pembangunan kampung pengolahan baru oleh Ditjen PDS di tempat seperti Pulau Pasaran. Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan kesepakatan yaitu :

- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dengan Pengolah Ikan Asin Kering (Damin) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan
- Kesepakatan antara Koperasi Nelayan Produsen Kalaju Pulau Pasaran dengan Pengolah Ikan Asin Kering (Edi) dalam rangka penyimpanan hasil perikanan

e. Kesimpulan:

Rapat menyimpulkan perlunya kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan suksesnya peresmian Kalamo. Disamping itu, pemantauan terhadap fasilitas dan langkah-langkah pemanfaatan akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan kualitas produk, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan ekspor dari kawasan tersebut. Diperlukan perhatian khusus

terhadap waktu pelaksanaan peresmian guna memperhitungkan kondisi alam dan sosial yang ada di wilayah terkait.

Dokumentasi



Gambar 27. Persiapan Peresmian Kalamo di Kota Bandar Lampung

3.2.7. Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana penyimpanan produk KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah. Bantuan yang diberikan dapat berupa sarana dan prasarana. Bantuan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan yaitu berupa gudang beku *Portable* dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Target indikator tahun 2024 adalah 15 unit. Gudang Beku Portabel adalah tempat penyimpanan hasil perikanan pada suhu tertentu dengan atau tanpa *Air Blast Freezer* yang dilengkapi pondasi, atap/rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung, memenuhi persyaratan sarana untuk berproduksi yang baik, penerapan sanitasi higienis, mudah dalam pemasangan, dan dapat dipindahkan.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya penurunan target dan anggaran di tahun 2024 sebesar 2 unit dari target tahun 2023 sebesar 17 unit. Jenis perhitungan data tahun 2024 adalah posisi akhir dan ditargetkan sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 15 unit. Sarana penyimpanan produk KP yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Belum

terdapat capaian sampai dengan Triwulan I dikarenakan masih dalam proses identifikasi calon penerima bantuan pemerintah

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Sarana Penyimpanan produk KP yang disediakan (Unit)	0	17	0	15	0	17	0	0	-	100	-	-

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu awal sebesar Rp37.152.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp9.384.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp526.833.363,- atau sebesar 1,41% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel

a. Waktu dan Tempat:

Rapat Penyusunan Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel diadakan pada tanggal 30 Januari 2024, dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana Dit. Logistik.

b. Peserta:

Rapat dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat IV, Pembina Mutu Ahli Madya dan Muda, APHP Ahli Madya, Perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik, Perwakilan BBP3KP, Perwakilan Timja BMN dan PBJ-Setditjen PDS, Perwakilan Timja Hukum-Setditjen PDS, serta Penanggung Jawab dan Pelaksana Timja Prasarana dan Sarana Dit. Logistik.

c. Tujuan:

Tujuan rapat adalah menyusun pedoman penilaian dan pembobotan untuk verifikasi dan validasi data CPCL Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel Tahun 2024 guna menentukan kelayakan penerima bantuan. Berfokus pada memperhitungkan pengalaman bisnis calon penerima, persyaratan dasar lokasi, dan pembelajaran dari kendala pada penyaluran BP sebelumnya.

d. Hasil:

Dibahas pedoman penilaian calon penerima sebagai dasar verifikasi dokumen usulan, pembobotan penilaian teknis, serta peran penting penyuluh dalam mendampingi kelompok saat permohonan dan pemanfaatan. Ditetapkan persyaratan dasar seperti ketersediaan lahan, listrik, lokasi strategis, dan pengalaman minimal 2 tahun di bidang perikanan untuk kelayakan calon penerima. Perhatian khusus pada kendala waktu yang panjang antara penetapan hingga pengadaan, mengingat kemungkinan perubahan kondisi lapangan.

e. Kesimpulan:

Rapat menyoroti pentingnya proses verifikasi dan validasi data CPCL untuk memilih penerima bantuan Gudang Beku Portabel secara objektif. Fokus pada persyaratan dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan serta pemanfaatannya. Diperlukan perencanaan yang matang mengingat kendala waktu yang dapat mempengaruhi kondisi lapangan.

Dokumentasi



Gambar 28. Penyusunan Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel

2) Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku di Beberapa Kabupaten

a. Waktu dan Tempat:

- Aceh Timur: 20 Februari 2024, PPN Idi
- Pekalongan: 22 Februari 2024, Setono/pintu toll Pekalongan
- Kabupaten Situbondo: 29 Februari 2024, PPI Jangkar dan PPI Besuki
- Kabupaten Konawe: 29 Februari 2024, Desa Sorue Jaya Kecamatan Soropia
- Kabupaten Manggarai Barat: 26 - 28 Februari 2024, Desa Warloka Pesisir

b. Peserta:

- Aceh Timur: Pj Kepala Dinas KP Aceh Timur, Kalabuh PPN Idi, Direktur PDAM Aceh Timur, Perwakilan PLN ULP Aceh Timur, Pj. Bupati Aceh Timur
- Pekalongan: Diskan Kota Pekalongan, tim KKP (Sekjen, PDS, DJPT), SKPD (BPN, Bappeda, Pengurus Koperasi Calon Pengelola, dll)
- Kabupaten Situbondo: DKP Kab. Situbondo, Bumdes, Pengurus Bumdes
- Kabupaten Konawe: Koperasi Cahaya Alam Bokori, nelayan, supplier ikan
- Kabupaten Manggarai Barat: Kepala Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan, masyarakat Desa Warloka Pesisir

c. Tujuan:

Melakukan identifikasi lokasi potensial untuk pembangunan gudang beku di beberapa kabupaten.

d. Hasil:

(1) Aceh Timur:

- Lokasi yang ditawarkan berada di kawasan PPN Idi, status lahan milik Pemda Provinsi Aceh dengan kondisi lahan sudah matang.
- Koordinasi dilakukan di lokasi PPN Idi dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
- Pihak Pemda Aceh Timur akan menjawab surat Ditjen PDSPKP beserta data dukung persyaratan awal yang dibutuhkan.

(2) Pekalongan:

- Lokasi strategis dekat dengan pasar batik Setono, tanah masih berupa sawah aktif yang akan berakhir sewa pada April 2024.
- Acara dilanjutkan dengan rapat pembahasan teknis, dipimpin oleh Kadiskan Pekalongan di Techno Park.
- Lokasi sudah ditetapkan dengan luas tertentu, pembangunan harus dilaksanakan pada tahun 2024 dengan target selesai Juli.
- Harapannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat Pekalongan dan berdampak bagi masyarakat/pengunjung.

(3) Kabupaten Situbondo:

- Terdapat 2 lokasi diusulkan, di PPI Jangkar dan PPI Besuki, dengan kondisi lahan tersedia dan status milik pemda Situbondo.
- Pengurus Bumdes akan melakukan musyawarah internal terkait kesiapan kemampuan finansial serta rencana bisnis pengelolaan GBP, sedangkan warga PPI Jangkar tidak yakin mampu menyiapkan anggaran persiapan serta mengelola GBP.
- Pihak dinas akan merespon kekurangan dokumen proposal sesuai persyaratan dalam Juknis.

(4) Kabupaten Konawe:

- Lokasi berada di Desa Sorue Jaya Kecamatan Soropia, kondisi lahan bersertifikat milik Pemda.
- Calon pengelola yang diusulkan adalah Koperasi Cahaya Alam Bokori yang beranggotakan 50 orang didominasi oleh nelayan, dan 4 orang supplier ikan.
- Komoditas utama adalah gurita dengan jumlah produksi 1-2 ton per hari, dengan komoditas lainnya seperti ikan ekor kuning, katamba, kerapu, dan kakatua.

(5) Kabupaten Manggarai Barat:

- Keragaan aktivitas perikanan di Desa Warloka Pesisir, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan distribusi ikan.
- Pengolahan ikan di Desa Warloka didominasi oleh pengolahan ikan kering, dengan pengolahan lainnya yang baru berkembang seperti abon ikan dan sambal ikan asap.
- Ketersediaan listrik dari PLN dan air bersih menjadi perhatian utama, dengan potensi kerja sama dengan PDAM atau badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan air di Kalamo Desa Warloka Pesisir.
- Ketersediaan gudang beku milik swasta dengan kapasitas 40 ton dan ABF 10 ton di Desa yang bersebelahan dengan Desa Warloka Pesisir, namun belum optimal pemanfaatannya

e. Kesimpulan:

Potensi pembangunan gudang beku di beberapa kabupaten sangat bergantung pada kerjasama antar instansi terkait, kesiapan masyarakat, dan kondisi lahan serta infrastruktur yang tersedia. Perencanaan dan persiapan yang matang diperlukan agar pembangunan gudang beku dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Dokumentasi



Gambar 29. Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Aceh Timur



Gambar 30. Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kota Pekalongan



Gambar 31 Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Situbondo



Gambar 32. Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Konawe



Gambar 33. Laporan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku Kab. Manggarai Barat

3) Rapat sosialisasi bantuan pemerintah TA. 2024

a. Waktu dan Tempat:

Rapat sosialisasi bantuan pemerintah TA. 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 secara daring.

b. Peserta:

Bapak Direktur Logistik, JF Utama, Madya, Bapak/Ibu Katimja, JP, Rekan-rekan lingkup Direktorat Logistik, Perwakilan Setditjen PDSPKP, Perwakilan Dinas Perikanan Provinsi zona 2 dan zona 3, Perwakilan Timja Direktorat Logistik dan Perwakilan Kurator Direktorat Logistik.

c. Tujuan:

Rapat dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana untuk menyosialisasikan bantuan pemerintah Tahun 2024. Hal ini merujuk pada KEP DIRJEN PDSPKP Nomor 87 tahun 2023 dan KEP DIRJEN PDSPKP Nomor 86 tahun 2023 mengenai petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah.

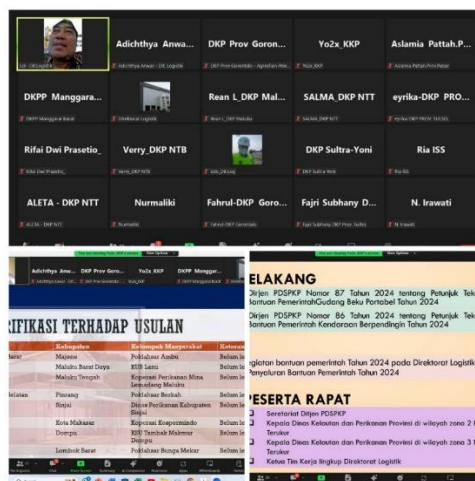
d. Hasil:

Jenis dan alokasi bantuan pemerintah termasuk 10 unit GBP jenis knockdown dan 10 unit Kendaraan Berefrigerasi roda 4/6. Kriteria calon penerima bantuan serta persyaratan teknis dan umum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Analisis kelayakan usaha dilakukan oleh tim teknis yang mencakup modal usaha, keberlanjutan bisnis, dan sumber daya manusia. Pertimbangan utama untuk GBP meliputi lokasi, modal usaha, dan ketersediaan listrik. Pertimbangan utama untuk Kendaraan Berefrigerasi meliputi legalitas.

e. Kesimpulan:

Setiap usulan calon penerima bantuan akan diklarifikasi dan direspon melalui surat resmi untuk kelancaran proses penyaluran bantuan.

Dokumentasi



Gambar 34. Rapat sosialisasi bantuan pemerintah TA. 2024

3.2.8. Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya penurunan target dan anggaran di tahun 2024 sebesar 15 unit dari target tahun 2023 sebesar 20 unit. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	0	20	0	5	0	20	0	0	-	100	-	-

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada) Rincian Output (RO) QEG Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit) sebesar Rp4.320.000.000,-

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp35.441.344,- atau sebesar 0,82% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024

a. Waktu dan Tempat:

Pada tanggal 29 Januari 2024, telah dilaksanakan Rapat pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024 di Jakarta.

b. Peserta:

Rapat tersebut dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana, dihadiri oleh Direktur Logistik, Pembina Mutu Ahli Madya dan Utama, APHP Ahli Madya, Perwakilan Timja Lingkup Dit. Logistik, Perwakilan Inspektorat IV, Perwakilan Timja BMN dan PBJ, Perwakilan Timja Hukum Setditjen PDS, serta Penanggung Jawab dan Pelaksana Timja Prasarana dan Sarana Dit. Logistik.

c. Tujuan:

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024, dengan fokus pada penambahan persyaratan teknis, pernyataan komitmen penerima, pengantar usulan proposal, dan perlunya surat rekomendasi untuk usulan dari aspirasi Komisi IV DPR.

d. Hasil:

Beberapa hasil pembahasan mencakup penambahan persyaratan teknis untuk penerima BP Kendaraan Berefrigerasi, pernyataan komitmen penerima dalam menyediakan biaya perawatan, operasional, dan biaya perpanjangan surat-surat, perlunya surat rekomendasi dari Komisi IV DPR, serta masukan terkait sosialisasi tugas dan fungsi KKP, perhitungan omset usaha minimal, monitoring bisnis proses, dan pertimbangan terhadap pendetilan persyaratan di juknis.

e. Kesimpulan:

Rapat ini menjadi forum penting dalam mengidentifikasi dan mempertimbangkan berbagai usulan revisi terkait bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024, termasuk persyaratan teknis, komitmen penerima, surat rekomendasi, dan aspek sosialisasi, pemantauan, serta evaluasi efektivitas bantuan yang diberikan. Menyusul rapat ini, langkah-langkah lebih lanjut diharapkan akan diambil untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program bantuan tersebut.

Dokumentasi



Gambar 35. Rapat pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024

2) Rapat Penyusunan Pedoman Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Kendaraan Refrigerasi TA. 2024

a. Waktu dan Tempat:

Rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Bogor.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana, dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat IV, KKP, Pembina Mutu Utama, Pembina Mutu Madya, APHP Utama, APHP Madya, dan perwakilan Timja Lingkup Direktorat Logistik.

c. Tujuan:

Rapat bertujuan untuk menyusun pedoman verifikasi dan validasi calon penerima Kendaraan Berefrigerasi TA. 2024.

d. Hasil:

Titik krusial dalam penyaluran bantuan kendaraan berefrigerasi adalah tahap verifikasi dan validasi calon penerima. Bantuan pemerintah harus tepat guna dan mudah dalam perawatan. Calon penerima harus memiliki mental

usahawan dan pengalaman dalam mengelola bisnis perikanan. Perlunya pembinaan kepada penerima saat mobil digunakan terkait tata cara distribusi ikan yang baik.

e. Kesimpulan:

Petugas verifikasi dan validasi harus mampu membedakan kebutuhan dan keinginan calon penerima. Bantuan pemerintah harus memberikan manfaat yang maksimal dan mudah dirawat..

Dokumentasi



Gambar 36. Rapat Penyusunan Pedoman Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Kendaraan Refrigerasi

3.2.9. Sasaran Kegiatan “Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha”

Indikator Kinerja Kegiatan “Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)”

Definisi indikator ini adalah Sarana distribusi yang disediakan dalam bentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigrasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target indikator tahun 2024 adalah 5 unit. Pengadaan sarana distribusi yang disediakan merupakan indikator baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir dan ditargetkan pada Triwulan IV adalah sebesar 5 unit.

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	

Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	0	-	-	5	0	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada Rincian Output (RO) QEG Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) sebesar Rp4.320.000.000,-. Belum ada realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Monitoring Sistem Pada Kendaraan Berefrigerasi

a. Waktu dan Tempat:

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 di Bogor.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja Prasarana dan Sarana, dihadiri oleh perwakilan PT. Duta Cemerlang Motors, PT TransTRACK, dan perwakilan Timja Lingkup Direktorat Logistik.

c. Tujuan:

Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan sistem monitoring pada kendaraan berefrigerasi yang dilengkapi dengan sistem track GPS.

d. Hasil:

Kendaraan berefrigerasi bantuan pemerintah telah dilengkapi dengan sistem track GPS. Sistem track GPS berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberadaan posisi kendaraan berdasarkan titik koordinat Latitude dan Longitude. Tujuan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan informasi, pelacakan, dan pemantauan secara real-time mengenai posisi, status, kecepatan, suhu, beban kendaraan, pengingat kecepatan, dan jarak tempuh. Fitur-fitur sistem track GPS meliputi pemantauan real-time, geofencing, perekam data perjalanan, dan aplikasi mobile untuk memantau dan mengontrol kendaraan dari jauh.

e. Kesimpulan:

Pihak TransTRACK akan diminta untuk membuat report custom berupa rekap jumlah muatan (mingguan/bulanan) dan suhu, selain report standar yang sudah ada.

Dokumentasi



Gambar 37. Sosialisasi Monitoring Sistem Pada Kendaraan Berefrigerasi

3.2.10. Sasaran Kegiatan “Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang”

Indikator Kinerja Kegiatan “Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)”

Definisi indikator ini adalah Badan usaha yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan yang difasilitasi sebagai kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang. Target indikator tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) Lembaga. Lembaga pengelola gudang beku yang di fasilitasi penerapan sistem resi gudang merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan dari target tahun 2023 sebanyak 3 lembaga karena peningkatan pagu anggaran sebesar Rp290.000.000,-. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024 adalah sebanyak 2 lembaga atau 100% terhadap target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama, capaian pada Tahun 2024 mengalami penurunan 33% dari capaian 2023 atau penurunan 1 lembaga hal ini dikarenakan adanya perubahan tim kerja dalam organisasi lingkup Ditjen PDSPKP pada awal tahun 2024, sehingga diperlunya penyesuaian. Namun demikian secara target sampai dengan Triwulan I sudah tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian IKK telah mencapai 20%.

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang (Lembaga)	2	7	2	10	2	7	3	-	100	100	150	20

Lembaga yang difasilitasi resi gudang Triwulan 1 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Perumda Karya Lasinrang yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dengan komoditas rumput laut;
- 2) CV. Anugerah Agung Global yang berdomisili di Kota Palopo dengan komoditas rumput laut;

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDB Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang dengan pagu awal sebesar Rp850.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp447.217.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp119.086.951,- atau sebesar 14,01% terhadap pagu awal. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 20% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 14,01%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sistem resi gudang

a. Waktu dan Tempat:

- Pada tanggal 6 Januari 2024, Provinsi Jawa Timur, secara luring dan daring (melalui video conference dengan aplikasi Zoom)
- Pada tanggal 1 Februari 2024, secara daring (melalui video conference dengan aplikasi Zoom).

b. Peserta:

- Narasumber dari Bappebti – Kementerian Perdagangan, lembaga pembiayaan, pelaku usaha pengelola gudang SRG, serta peserta coaching clinic
- Narasumber dari BLU LPMUKP, perwakilan pelaku usaha perikanan, serta tim pengelola SRG.

c. Tujuan:

Sosialisasi pembiayaan SRG untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku usaha perikanan.

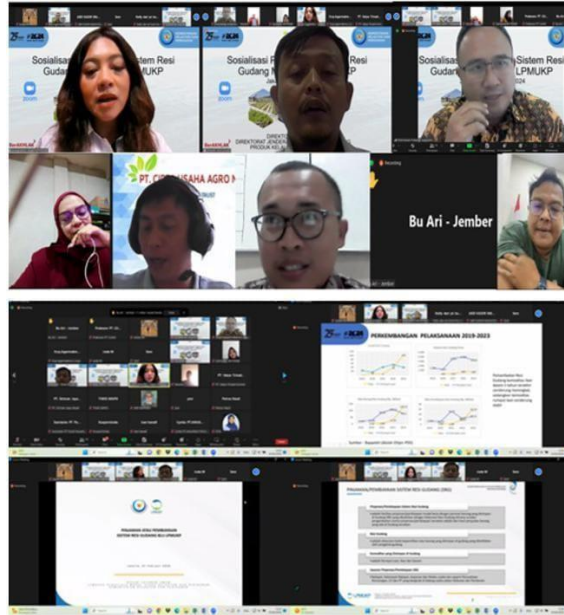
d. Hasil:

- PT Cipta Usaha Agro Niaga mengharapkan bantuan KKP dalam pemasaran produknya dengan harga yang sesuai sehingga dengan adanya keuntungan dapat digunakan untuk membayar bunga bank, biaya simpan, dan operasional lainnya.
- KKP dan Bappebti akan bersama-sama mengidentifikasi permasalahan dan menyusun rencana tindak lanjut permasalahan dan kendala yang terjadi pada penerapan Sistem Resi Gudang
- Pertemuan lanjutan dengan BLU LPUMKP dalam penentuan alokasi pembiayaan untuk kegiatan SRG komoditas perikanan.
- Pertemuan bersama Bappebti untuk menindaklanjuti dan melihat peluang penambahan komoditas ikan olahan dalam penerapan SRG

e. Kesimpulan:

Diperlukan koordinasi yang baik antara pihak terkait untuk mengatasi kendala dalam penerapan SRG guna meningkatkan pemasaran dan pengelolaan komoditas perikanan.

Dokumentasi



Gambar 38. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sistem resi gudang

2) Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang Di Provinsi Sulawesi Selatan

a. Waktu dan Tempat:

Identifikasi calon pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) dilakukan di Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 sd 23 Februari 2024.

b. Peserta:

Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah, Perumda Karya Lasinrang, CV Anugerah Agung Global, Koperasi Adi Luwung, pembudidaya rumput laut, Bappebti.

c. Tujuan:

Melaksanakan implementasi tugas dan fungsi pemantauan terkait Sistem Resi Gudang di bidang Hasil Kelautan dan Perikanan, serta mengidentifikasi calon pengelola gudang SRG di Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Pinrang

d. Hasil:

Produksi rumput laut tertinggi di Kota Palopo pada tahun 2023 sebesar 173.858 ton, dengan 32 gudang milik swasta/pribadi dan 7 gudang milik Dinas Perikanan. Di Kabupaten Luwu Timur, produksi rumput laut mencapai 359.531 ton, dengan 10 gudang milik swasta dan Pemerintah, di

antaranya 8 unit dikelola oleh Koperasi Adi Luwung. Kabupaten Pinrang menghasilkan 35.874 ton rumput laut jenis *Eucheuma Cottonii* pada tahun 2023. Dukungan implementasi SRG untuk menstabilkan harga di tingkat pembudidaya, seperti tunda jual saat harga murah dan agunan ke lembaga pembiayaan. Dinas Perikanan mendukung implementasi SRG komoditas rumput laut di Kabupaten Pinrang. Perumda Karya Lasinrang di Kabupaten Pinrang telah melakukan kerjasama pengelolaan gudang milik Pemerintah Kabupaten. Lembaga pengelola gudang SRG yang difasilitasi yaitu

- ✓ Perumda Karya Lasinrang yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dengan komoditas rumput laut;
- ✓ CV. Anugerah Agung Global yang berdomisili di Kota Palopo dengan komoditas rumput laut;

e. Kesimpulan:

Implementasi Sistem Resi Gudang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Palopo, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Luwu Timur, memiliki potensi untuk meningkatkan harga dan kesejahteraan pembudidaya rumput laut. Namun, masih diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang sistem ini dan solusi untuk mengatasi kendala pembiayaan dan jarak dari lokasi pembudidaya.

Dokumentasi



Gambar 39. Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang di Kab Pinrang



Gambar 40. Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang di Kota Palopo

3) Pemantauan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut PT Satya Trinadi Komira Perkasa

a. Waktu dan Tempat:

Dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024 di Gudang PT Satya Trinadi Komira Perkasa, Kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

b. Peserta:

Tim Direktorat Logistik.

c. Tujuan:

Melakukan pemantauan perkembangan proses implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) komoditas ikan. Identifikasi kendala dalam implementasi SRG. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SRG PT Satya Trinadi Komira Perkasa.

d. Hasil:

PT Satya Trinadi Komira Perkasa telah terdaftar sebagai pengelola gudang SRG ikan sejak 13 Januari 2023. Gudang kapasitas 750 ton sudah disiapkan untuk implementasi SRG Ikan di Kawasan Kosambi. Implementasi SRG belum dilakukan karena terkendala akses perbankan dari Bank BRI dan BNI cabang Kota belum menyetujui. Komoditas yang akan diajukan resi gudangnya diantaranya ikan layang, babytuna, dan cakalang. Implementasi SRG PT Satya Trinadi Komira Perkasa melibatkan para pelaku usaha ikan di wilayah Tangerang dan Muara Baru.

e. Kesimpulan:

Implementasi SRG PT Satya Trinadi Komira Perkasa telah mencapai tahap persiapan yang matang dengan terdaftarnya sebagai pengelola gudang SRG ikan dan persiapan gudang yang sudah dilakukan. Namun, kendala akses perbankan masih menjadi hambatan utama yang perlu segera diselesaikan agar implementasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

Dokumentasi



Gambar 41. Pemantauan Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) Rumput Laut PT Satya Trinadi Komira Perkasa

4) Laporan Identifikasi Calon Pengelola Gudang SRG di Kabupaten Jember

a. Waktu dan Tempat:

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 di Kabupaten Jember, Jawa Timur

b. Peserta:

Tim dari Direktorat Logistik dan Dinas KP

c. Tujuan:

Melakukan identifikasi calon pengelola gudang SRG di Kabupaten Jember

d. Hasil:

Calon pengelola gudang yang diidentifikasi adalah Koperasi Muchlisul Amin Barokah Abadi (Maba) di Jelbuk, Kabupaten Jember. Koperasi Maba membina sekitar 3000 anggota yang memiliki usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk 150 anggota yang bergerak di bidang perikanan (budidaya dan pengolahan pindang). Pada tahun 2023, Koperasi Maba bekerja sama dengan Bank BJB untuk usaha pembesaran ternak domba dan kambing. Pada tahun 2024, Bank BJB memperkenalkan skema pembiayaan SRG dan menawarkan kerja sama pembiayaan tersebut dengan Koperasi Maba. Koperasi Maba juga mengelola *Cold Storage* dengan kapasitas 30 ton di Kabupaten Bondowoso untuk menyimpan ikan pindang yang akan dijual di pasar-pasar di Kabupaten Bondowoso dan

Jember. Dokumen persyaratan pengusulan sebagai gudang SRG yang telah dimiliki Koperasi Maba adalah NIB, SIUP, dan TDP, sedangkan SKP dan TDG belum ada. Koperasi Maba berharap dapat mempelajari lebih lanjut skema pembiayaan SRG dan melakukan kunjungan ke gudang-gudang yang telah menerapkan SRG.

e. Kesimpulan:

Koperasi Muchlisul Amin Barokah Abadi (Maba) di Jelbuk, Kabupaten Jember, merupakan calon pengelola gudang SRG yang potensial dengan aktivitas usaha yang beragam, termasuk dalam bidang perikanan. Koperasi ini memiliki potensi untuk mengelola gudang SRG dengan baik setelah memenuhi persyaratan yang belum lengkap seperti SKP dan TDG.

Dokumentasi



Gambar 42. Laporan Identifikasi Calon Pengelola Gudang SRG di Kabupaten Jember

3.2.11. Sasaran Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan (Lembaga)

Definisi indikator ini adalah Inisiasi Kerjasama antar pelaku Usaha Perikanan dengan pelaku usaha Kapal Angkut Perikanan dalam mendukung Pengangkutan dan Pendistribusian Hasil Perikanan.

Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu penambahan 5 lembaga atau total target sebanyak 8 lembaga. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan

dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Belum terdapat capaian sampai dengan Triwulan I, baik pada tahun 2024 maupun tahun 2023.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	0	3	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I tidak terdapat permasalahan. Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDB Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan dengan pagu awal sebesar Rp800.000.000,-. Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp300.000.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti.

Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp53.458.294,- atau sebesar 6,68% terhadap pagu awal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1) Laporan Pertemuan Perencanaan Teknis Kapal Angkut Ikan

a. Waktu dan Tempat:

Pertemuan berlangsung pada 13 Maret 2024 di Surabaya.

b. Peserta:

Tim Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yang diwakili oleh Dr. Beny Cahyono (Ketua Departemen), Prof. Saut Gurning, Dr. Baidoni, Dr. Edi, dan Dr. Jun. Tim Direktorat Logistik, yang terdiri atas Katimja Dukman, PJ Pengadaan Timja PD, dan Pelaksana Timja PD.

c. Tujuan:

Pertemuan bertujuan untuk membahas perencanaan teknis pembangunan Kapal Angkut Ikan, termasuk output pekerjaan, persyaratan kualifikasi penyedia, standar teknis, kebutuhan tenaga ahli, dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan.

d. Hasil:

ITS menyatakan kesiapannya untuk mendukung KKP dalam membangun Kapal Angkut Ikan. Estimasi waktu ideal untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan adalah 2,5 hingga 3 bulan, dengan pertimbangan beberapa poin pekerjaan seperti class approval dan uji tarik yang membutuhkan waktu minimal 2 bulan. ITS meminta dukungan data berupa laporan kajian yang telah dilakukan, terutama di zona 3, untuk mempercepat penyiapan dokumen analisis teknis yang akan menjadi dasar untuk menentukan kapasitas kapal angkut ikan yang akan dibangun, sehingga dapat beroperasi secara optimal. Mekanisme pelaksanaan pekerjaan akan dirancang dengan menggunakan swakelola tipe 2, dengan catatan, adanya MoU kerjasama antara KKP dengan ITS. Perlu dilakukan need assessment sekali lagi di tingkat Pimpinan KKP dengan Tim ITS sehingga dapat disusun dokumen teknis yang komprehensif.

e. Kesimpulan:

Pertemuan tersebut menunjukkan kesepakatan antara KKP dan ITS untuk bekerja sama dalam perencanaan pembangunan Kapal Angkut Ikan, dengan ITS sebagai mitra teknis yang siap memberikan dukungan dan expertise-nya. Diperlukan langkah-langkah lanjutan seperti pengumpulan data kajian dan penyiapan dokumen teknis yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan proyek ini.

Dokumentasi



Gambar 43. Laporan Pertemuan Perencanaan Teknis Kapal Angkut Ikan

2) Rapat Persiapan Perencanaan Teknis Kapal Angkut

a. Waktu dan Tempat:

Rapat dilaksanakan pada 20 Maret 2024 di ruang rapat Direktorat Logistik lantai 12 GMB 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Peserta:

Perwakilan dari Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Timja Hukum. Timja Pengadaan dan BMN Seditjen PDSPKP, Timja Pengadaan dan Distribusi, Timja Pemantauan, Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Timja Penyimpanan dan Timja Dukungan Manajerial.

c. Tujuan:

Rapat bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan teknis pembangunan Kapal Angkut Ikan, dengan fokus pada output pekerjaan, persyaratan kualifikasi penyedia, standar teknis, dan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung.

d. Hasil:

Kapal Angkut Ikan dibutuhkan untuk mengangkut hasil tangkapan dalam jumlah besar, menjaga kualitas ikan, dan mendukung industrialisasi perikanan melalui konsolidasi muatan. Poin-poin diskusi meliputi output pekerjaan, persyaratan kualifikasi penyedia, standar teknis, dan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung. Mekanisme pelaksanaan akan dirancang dengan menggunakan swakelola tipe 2, dengan catatan adanya MoU kerjasama antara KKP dengan ITS. Perlu dilakukan *need assessment* sekali lagi di tingkat pimpinan KKP dengan Tim ITS untuk menyusun dokumen teknis yang komprehensif.

e. Kesimpulan:

Rapat menegaskan pentingnya pembangunan Kapal Angkut Ikan dalam mendukung peningkatan daya saing perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin yang sesuai, penerapan SCM, dan implementasi SLIN. Langkah-langkah lanjutan termasuk pembuatan MoU kerjasama antara KKP dan ITS serta *need assessment* untuk menyusun dokumen teknis yang komprehensif.

Dokumentasi



Gambar 44. Rapat Persiapan Perencanaan Teknis Kapal Angkut

3.2.12. Sasaran Kegiatan Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton

Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)

Definisi indikator ini adalah Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam rangka peningkatan operasional gudang beku 1000 ton.

Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu penambahan 300% (3 unit) atau total target sebanyak 4 unit. Belum terdapat capaian sampai dengan Triwulan I, baik pada tahun 2024 maupun tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Tabel 14. Target dan capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	0	1	0	4	0	1	0	0	0	100	0	0

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RBQ Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton dengan pagu awal sebesar Rp2.050.000.000,- yang bersumber dari anggaran PNB. Belum adanya capaian PNB lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNB belum dapat digunakan. Belum ada realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

3.2.13. Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit)

Indikator Kinerja Kegiatan Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)

Definisi indikator ini adalah Sarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang disediakan dalam mendukung operasional dan efektifitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu.

Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku (unit) merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Adanya penurunan target tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu penurunan 21,7% (80 unit) atau total target sebanyak 287 unit. Hal ini dikarenakan penurunan anggaran di tahun 2024 sebesar 55% atau sebesar Rp1.755.886.000,- dari anggaran tahun 2023. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jenis perhitungan data adalah posisi akhir.

Tabel 15. Target dan capaian IK 13

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	0	379	0	287	0	1	0	0	0	100	0	0

Untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu RAL Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku dengan pagu awal sebesar Rp1.434.500.000,- yang bersumber dari anggaran PNB. Belum adanya capaian PNB lingkup Setditjen PDSPKP yang dapat dilaporkan kepada Kementerian Keuangan, sehingga anggaran PNB belum

dapat digunakan. Belum ada realisasi anggaran sd Triwulan I karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan.

3.2.14. Sasaran Kegiatan Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik pada Direktorat Logistik. Target indikator tahun 2024 adalah sebesar 1.100 orang.

Indikator ini merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Terdapat penurunan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yaitu penurunan sebesar 9,4% atau 115 orang dari target 2023. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah bantuan pemerintah yang menjadi target penghitungan yaitu dari 37 unit pada tahun 2023 menjadi 25 unit pada tahun 2024. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Capaian sampai dengan Triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar 55 orang atau sebesar 110% dari target sampai dengan Triwulan 1. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama, adanya peningkatan sebesar 55 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian IKK telah mencapai 5 %. Capaian Triwulan 1 diperoleh dari tenaga kerja yang terlibat pada pelaksanaan indikator kegiatan Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di fasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang, dimana capaiannya 2 Lembaga yang difasilitasi sistem resi gudang.

Tabel 16. Target dan capaian IK 14

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	50	1.215	-	1.100	55	1.257	-	55	110	103	-	5

3.2.15. Sasaran Kegiatan Tercapainya Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SubSektor Kelautan dan Perikanan bidang penguatan daya saing produk Kelautan dan perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Nilai PNBP lingkup Direktorat Logistik merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena masih pembahasan perubahan organisasi lingkup KKP sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024.

Jenis perhitungan data adalah posisi akhir. Indikator kinerja bersifat tahunan. Adanya penurunan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,6 miliar atau menurun 69% dari target tahun 2023. Hal ini dikarenakan sudah dipindahkannya asset gudang beku 1000 Ton Muara Baru dan Mobil Refrigerasi yang menjadi objek penarikan PNBP kepada BP3KP. Target PNBP tahun 2024 sebesar 2,06 miliar berasal dari gudang beku 2000 ton sebagai objek penarikan PNBP.

Tabel 17. Target dan capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	-	6,66	-	2,06	-	6,69	-	-	-	-	-	-

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian PNBP antara lain sebagai berikut :

1) Pemantauan Perbaikan Sarana Prasarana Pasca Berakhir Masa Perjanjian Transisi dengan Perindo

a. Waktu dan Tempat:

Pada tanggal 5 Maret 2024, dilaksanakan Pemantauan Perbaikan Sarana Prasarana Pasca Berakhir Masa Perjanjian Transisi dengan Perindo, di lokasi Gudang Beku yang berada di [lokasi tertentu].

b. Peserta:

Pemantauan tersebut melibatkan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk Direktorat Logistik serta perwakilan dari PT Perindo dan penyewa ruangan cold storage.

c. Tujuan:

Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan perbaikan sarana prasarana gudang beku pasca berakhirnya perjanjian transisi dengan PT Perindo. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk memastikan kelancaran operasionalisasi gudang beku.

d. Hasil:

Ditemukan beberapa area yang membutuhkan perbaikan, termasuk ruang kantor, anteroom, ruang pembekuan, ruang penyimpanan, ruang mesin, toilet, dan mushola. Kerusakan meliputi kebocoran, kerusakan struktural, lampu yang tidak menyala, dan masalah lainnya. Terdapat keterisian ruang penyimpanan oleh penyewa yang berbeda, dengan beberapa ruangan masih belum kosong sesuai dengan kesepakatan. Biaya listrik dan air bulanan telah tercatat, serta kebutuhan akan penambahan AC di ruang kantor dan ruang rapat.

e. Kesimpulan:

Kondisi gudang beku perlu perbaikan serius untuk memastikan operasionalisasi yang lancar dan keamanan pengguna. PT Perindo diminta untuk menyelesaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KKP. Direktorat Logistik telah menyuratkan tindak lanjut kepada PT Perindo untuk memastikan kelancaran proses, termasuk pemindahan kepemilikan ruangan dan komunikasi dengan penyewa.

Dokumentasi



Gambar 45. Pemantauan Perbaikan Sarana Prasarana Pasca Berakhir Masa Perjanjian Transisi dengan Perindo

2) Koordinasi dan Perbaikan Gudang Beku 2000 ton

a. Waktu dan Tempat:

Serangkaian kegiatan dilakukan pada tanggal 15 - 16 Maret 2024 di Gudang Beku 2000 ton.

b. Peserta:

Peserta terdiri dari Katimja Penyimpanan, Manajer Operasional PT Perindo, perwakilan Timja BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PDSPKP, Ketua Timja Dukungan Manajerial Direktorat Logistik, perwakilan BBP3KP, dan pelaksana Timja Penyimpanan.

c. Tujuan:

Tujuan rapat dan koordinasi adalah untuk mengevaluasi akhir masa transisi pengelolaan Gudang Beku 2000 ton oleh PT Perindo serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi penyimpanan.

d. Hasil:

Rapat Koordinasi Pengelolaan CS 2000 ton: Dilakukan untuk menindaklanjuti dispensasi yang diberikan kepada PT Perindo untuk

perbaikan hingga tanggal 15 Maret 2024. Ditemukan beberapa kewajiban perbaikan yang belum terpenuhi karena aktivitas mitra yang masih intens di beberapa ruang penyimpanan.

Rapat Pembahasan Stok Opname: Dilaksanakan untuk menetapkan mekanisme pengelolaan baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021. Dilakukan inventarisasi stok ikan dan penyusunan Berita Acara stok opname.

Koordinasi Optimalisasi Penyimpanan: Identifikasi kebutuhan perbaikan dan keindahan Gudang Beku 2000 ton dilakukan. Dilakukan pembersihan ruang proses, ABF, dan ruang penyimpanan, serta penghapusan atribut PT Perindo yang tidak relevan. Rencana perbaikan dan pembenahan disusun dalam sebuah matriks.

e. Kesimpulan:

Diperlukan kerjasama yang lebih intensif antara PT Perindo dan instansi terkait untuk menyelesaikan kewajiban perbaikan. Mekanisme pengelolaan baru telah ditetapkan dan perlu diterapkan secara ketat untuk mengoptimalkan penyimpanan dan pengelolaan Gudang Beku 2000 ton. Rencana perbaikan harus segera dilaksanakan untuk memastikan operasional yang lancar dan pelayanan yang prima kepada mitra.

Dokumentasi



Gambar 46. Koordinasi dan Perbaikan Gudang Beku 2000 ton

3) Review Okupansi dan Tarif Listrik CS 2000 ton

a. Waktu dan Tempat:

Rapat Review Okupansi dan Tarif Listrik CS 2000 ton dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 di Ruang Rapat Direktorat Logistik dan Ruang Rapat CS 2000 ton.

b. Peserta:

Rapat dipimpin oleh Katimja Penyimpanan dan dihadiri oleh Tim Inspektorat IV KKP, perwakilan Timja Keuangan dan Pengendalian Internal, perwakilan Timja BMN dan PBJ, serta pelaksana Timja Penyimpanan.

c. Tujuan:

Tujuan rapat adalah untuk meninjau okupansi (keterisian) dan menetapkan tarif listrik CS 2000 ton pasca berakhirnya masa transisi, serta menetapkan komitmen pembayaran PNBPN sesuai dengan PP 85 Tahun 2021.

d. Hasil:

Dilakukan penghitungan bersama terkait keterisian CS 2000 ton antara mitra pengguna dan Direktorat Logistik, yang dituangkan dalam berita acara. Mitra diharapkan membuat komitmen pembayaran PNBPN sesuai PP 85 Tahun 2021 mulai tanggal 16 Maret 2024. Dilakukan simulasi penghitungan tarif listrik berdasarkan beban daya, okupansi, dan volume keluar masuk barang mulai tanggal 15 Maret 2024. Rata-rata okupansi CS 2000 ton dari data Perindo 6 bulan terakhir sebesar 41%, sementara rata-rata okupansi mitra sebesar 57%. Tarif listrik dihitung berdasarkan asumsi okupansi CS 2000 ton sebesar 60% dan 50%, dengan nilai tarif masing-masing Rp10,83,- dan Rp12,99,- per kg/hari. Direktur Logistik akan membuat penetapan keputusan terkait nilai tarif listrik berdasarkan hasil review tersebut.

e. Kesimpulan:

Perlu dilakukan pengukuran okupansi secara bersama-sama antara mitra pengguna dan Direktorat Logistik untuk menetapkan tarif listrik yang tepat. Mitra diharapkan membuat komitmen pembayaran PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan nilai tarif listrik akan menjadi langkah penting untuk pengelolaan yang efisien dan transparan dari CS 2000 ton setelah berakhirnya masa transisi.

Dokumentasi



Gambar 47. Review Okupansi dan Tarif Listrik CS 2000 ton

3.2.16. Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKPPenyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 87 sedangkan target semester I adalah sebesar 75. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Perhitungannya adalah semesteran, sehingga belum ada capaian sampai dengan Triwulan 1. Kegiatan yang dilakukan antara lain : keikutsertaan pegawai di lingkungan Direktorat Logistik dalam pelatihan, seminar dan workshop untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu dilakukan pencatatan kehadiran absensi pegawai.

Tabel 18. Target dan capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	-	83,2	-	87	-	90,17	-	-	-	108,3	-	-

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IPASN antara lain sebagai berikut :

- 1) Rapat Penyusunan AD/ART dan Kode Etik Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP pada tanggal 16 Januari 2024.

Dokumentasi



Gambar 48. Rapat Penyusunan AD/ART dan Kode Etik Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP

- 2) Kegiatan Penyusunan Uraian Fungsi Jabatan Tinggi Pratama Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Unit Pelaksana Teknis dan pada tanggal 19 – 20 Maret 2024 Di Bogor Jawa Barat.

Dokumentasi



Gambar 49. Rapat Penyusunan Uraian Jabatan Tinggi Pratama lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 84, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,5 poin atau meningkat 4,3% dari target tahun 2023.

Tabel 19. Target dan capaian IK 17

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	-	80,5	-	84	-	85,45	-	-	-	106,1	-	-

Direktorat Logistik menghadiri beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran s.d Periode Triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal 3 s.d 5 Januari 2024.

Kegiatan dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan pembahasan dilaksanakan oleh Koordinator Program yang dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP, Biro perencanaan dan Kementerian PPN/Bappenas. Agenda pada rapat dimaksud adalah Pengisian Capaian, Verifikasi dan Validasi capaian Indikator Kinerja pada Aplikasi Emonev Bappenas PP 39, evaluasi Rencana Aksi Indikator Kinerja Level 2 dan 1 Evaluasi renaksi periode triwulan IV tahun 2023.

Dokumentasi



Gambar 50. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran s.d Periode Triwulan IV Tahun 2023

- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 pada tanggal 17 s.d 18 Januari di Depok yang dihadiri oleh tim kinerja Ditjen PDSPKP, Inspektorat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu.

Dokumentasi



Gambar 51. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

- 3) Rekonsiliasi Dokumen Kinerja pada tanggal 19 s.d. 20 Februari 2024 pada di Bogor yang dihadiri oleh tim kinerja Ditjen PDSPKP, Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Perencanaan Setjen KKP.

Dokumentasi



Gambar 52. Rekonsiliasi Dokumen Kinerja Ditjen PDSPKP

- 4) Focus group Discussion Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Periode 2025-2029 (Renstra Teknokratik Ditjen PDSPKP Tahun 2025-20229) pada tanggal 5 s.d 6 Februari 2024 di Jakarta.

Dokumentasi



Gambar 53. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

- 5) Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2024 pada tanggal 3 Februari 2024 yang melibatkan seluruh eselon II dan tim kinerja lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan dimaksud dalam rangka adalah melakukan pemantapan Indikator Kinerja Level 1 dan level II Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dan Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Level 1 dan 2 Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Dokumentasi



Gambar 54. Dialog Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

- 6) Rapat Kerja Teknis Ditjen PDSPKP pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2024 di Yogyakarta.

Kegiatan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Maret 2024. Kegiatan dihadiri oleh Tenaga ahli dan pakar perikanan, Kepala Dinas KP Provinsi, kepala dinas kelautan dan perikanan kab/kota, asosiasi perikanan, UMKM, Direktur lingkup PDS dan ketua tim kerja lingkup Ditjen PDSPKP.

Dokumentasi



Gambar 55. Rapat Kerja Teknis Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2023 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya persamaan antara target tahun 2023 dengan tahun 2024 yaitu 100.

Tabel 20. Target dan capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Direktorat Logistik (%)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100	-	-

Direktorat Logistik telah mengikuti beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja dan sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi triwulan IV tahun 2024 antara lain :

- 1) Telah melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko pada kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP tahun 2024 dan melakukan pemantauan atas pemantauan dokumen manajemen risiko tahun 2023;

- 2) Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan periode Semester II Tahun Anggaran 2023 (Unaudited) Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 15 s.d 20 Januari 2024.

Pada kegiatan ini Satuan Kerja lingkup Ditjen PDSPKP dan Eselon 1 telah menyusun laporan keuangan dan memetakan secara detail seluruh permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan;

- 3) Rapat Pemanfaatan BMN Ditjen PDSPKP yang dikerjasamakan dengan PT Perindo pada tanggal 12 Februari.

Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal PDSPKP dan dihadiri oleh Itjen KKP, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Kepala Biro Keuangan KKP, dan seluruh perwakilan Direktorat dari Ditjen PDSPKP.

- 4) Penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Negara Berupa Cold Storage 2000 Ton dan Sarana Pendukungnya di Muara Baru Dalam Masa Transisi dan Perjanjian Sewa Gedung Bangunan Pasar Ikan Modern Muara Baru. DKI Jakarta Dalam Masa Transisi pada tanggal 16 Februari 2024

- 5) Kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban permintaan BPK-RI pada tanggal 22 Januari 2024 di ruang rapat Investasi GMB III lantai 15;

- 6) Keikutsertaan dalam kegiatan monitoring kualitas data keuangan serta Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2024.

Biro Keuangan KKP melakukan reuiu bersama Inspektorat IV KKP dan menerbitkan BAR Rekon LK TA 2023 (Unaudited) dan Kertas Kerja Reuiu (KKR) LK TA 2023 (Unaudited);

- 7) Keikutsertaan dalam kegiatan rekonsiliasi pengelolaan piutang yang telah diserahkan ke PUPN di lingkungan KKP pada tanggal 25 Maret 2024 di GMB II lantai 14;

- 8) Keikutsertaan dalam kegiatan rekonsiliasi data dan pembahasan TLRHP BPK-RI triwulan I 2024 tanggal 26 Maret 2024 di ruang rapat lantai II.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024.

Adanya peningkatan target tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 5 poin atau meningkat 6,6 % dari target tahun 2023. Capaian pada Triwulan I sebesar 100 atau sebesar 125% dari target. Persentase Realisasi sd

Triwulan I terhadap Target 2024 sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama, adanya peningkatan sebesar 2 poin atau 2 % dari capaian sampai dengan Triwulan 1 tahun 2023.

Tabel 21. Target dan capaian IK 19

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80	75	75	80	100	97	98	99	125	129,3	130,6	125

Pada Triwulan I 2024, Direktorat Logistik telah mengikuti pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan. Pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 12 Februari 2024. Rapat dihadiri oleh perwakilan tim kerja unit eselon II dengan agenda pembahasan laporan hasil pemeriksaan beserta dokumen tindak lanjut yang harus disiapkan. Dokumen dimaksud agar segera disiapkan agar dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

- Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 2 komponen, yaitu Komponen Dokumen, dan Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Indikator ini ditargetkan sebesar 94. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2 poin.

Capaian pada Triwulan I adalah sebesar 133,33% atau 141,84% dari target Triwulan 1. Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024 adalah

sebesar 141,84. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 periode yang sama, adanya peningkatan sebesar 33,33 % dari capaian sampai dengan Triwulan 1 tahun 2023.

Tabel 22. Target dan capaian IK 20

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	92	92	94	133,33	130	100	133,33	141,84	141,3	108,6	141,84

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan I Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Indikator ini ditargetkan sebesar 80. Indikator kegiatan ini merupakan lanjutan dari indikator tahun 2023, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Adanya peningkatan target tahun 2024 dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,5 poin atau 3,2% dari target tahun 2023. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan 1 belum terdapat penilaian.

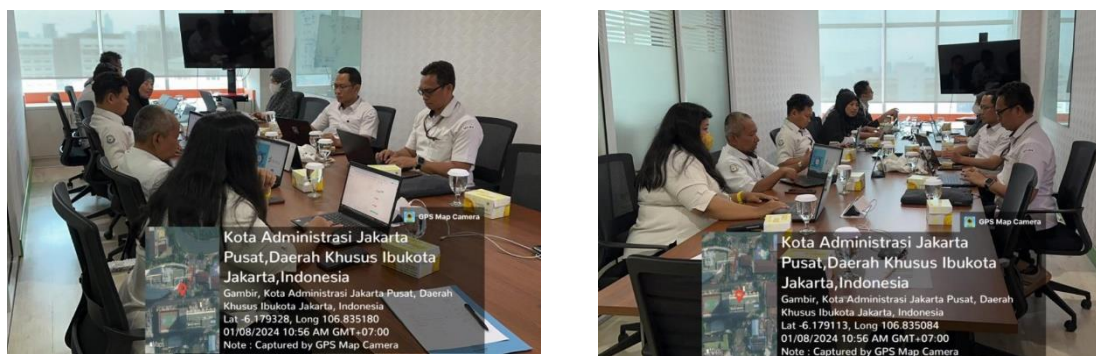
Tabel 23. Target dan capaian IK 21

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	-	77,5	-	80	-	100	-	-	-	129	-	-

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Direktorat Logistik mengikuti kegiatan pemantauan secara berkala atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Direktorat Logistik telah mengikuti beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Januari 2024

Dokumentasi



Gambar 56 Penyusunan Lporan Evaluasi/Program Ditjen PDSPKP

- 2) Keikutsertaan pada Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan berbasis rincian output, kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) pada tanggal 12 s.d. 13 Februari 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)

Jumlah persentase anggaran yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Logistik dalam satu tahun anggaran. Persentase realisasi anggaran Direktorat Logistik tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% atau sama dengan target tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV sehingga pada Triwulan 1 belum terdapat penilaian.

Tabel 24. Target dan capaian IK 22

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi sd TW I terhadap Target 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Sd TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	-	95	-	95	-	99,9	-	-	-	105,1	-	-

Direktorat Logistik telah mengikuti beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- 1) Melakukan penginputan capaian output melalui aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Satker Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- 2) Monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput seluruh satker Ditjen PDSPKP pada Aplikasi SMART Kemenkeu;
- 3) Berpartisipasi dalam rapat Assessment Rincian output KKP bersama Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Januari 2024;

Dokumentasi



Gambar 57 Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP

- 4) Melakukan assessment rincian output lingkup Ditjen PDSPKP melalui aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Januari 2024.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Sehubungan dengan tindaklanjut Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Direktorat Logistik mendapatkan blokir anggaran automatic adjustment sebesar Rp.11.573.117.000,- dari pagu semula Rp57.574.000.000,- sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2024 tanggal 26 Februari 2024. Realisasi anggaran Direktorat Logistik sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 1.720.861.553,- sehingga persentase realisasi anggaran total sebesar 2,98% dari pagu awal **(sumber data Sakti SP2D)** Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 31 Maret 2024

No	Rincian Ouput	Pagu Awal (Rp)	Blokir Automatic Adjustment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu awal (%)
1	ABR.004 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	1.250.000.000	454.000.000	123.596.146	1.126.403.854	9,888
2	AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	1.160.000.000	329.900.000	475.725.767	684.274.233	41,011
3	BDB.001 Pengelola Kapal Pengangkut yang difasilitasi mendukung logistik Hasil Perikanan	800.000.000	300.000.000	53.458.294	746.541.706	6,682
4	BMA.051 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	1.000.000.000	318.000.000	138.997.396	861.002.604	13,900
5	QDB.002 Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang	850.000.000	447.217.000	119.086.951	730.913.049	14,010
6	QDB.003 Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok	1.000.000.000	340.000.000	209.893.669	790.106.331	20,989
7	QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP	37.152.000.000	9.384.000.000	526.833.363	36.625.166.637	1,418
8	QEG.002 Sarana distribusi logistik produk KP	4.320.000.000	-	35.441.344	4.284.558.656	0,820
9	QEG.006 Mobil refrigerasi (MP korporasi)	4.320.000.000	-	-	4.320.000.000	0,000
10	RAL.051 Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.434.500.000	-	-	1.434.500.000	0,000
11	RAN.001 Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan	2.237.500.000	79.783.000	37.828.623	2.199.671.377	1,691
12	RBQ.003 Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	2.050.000.000	-	-	2.050.000.000	0,000
TOTAL		57.574.000.000	11.652.900.000	1.720.861.553	55.853.138.447	2,989

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Maret 2024. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 112,5 (kategori Istimewa). Adanya peningkatan 3,91 poin atau 3,6% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023, namun jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 11,15 poin atau 11% dari capaian sampai dengan Triwulan 4 tahun 2023. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan I diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan); target 5 Kesepakatan; capaian 7 Kesepakatan atau 140% dari target;
- IKK Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga); target 2 Lembaga; capaian 2 Lembaga atau 100%;
- IKK Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang); target 50 Orang; capaian 55 Orang atau 110% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%); target 80; capaian 99 atau sebesar 123,75% dari target;
- IKK Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%); target 94%; capaian 133,33% atau 141,84% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT LOGISTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Berny A. Subki**
Jabatan : Direktur Logistik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

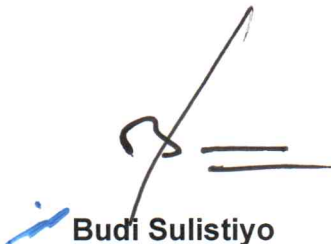
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Pihak Pertama,
Direktur Logistik**


Budi Sulistiyo


Berny A. Subki



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT LOGISTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Berny A. Subki**
Jabatan : Direktur Logistik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Pihak Pertama,
Direktur Logistik**

Budi Sulistiyo

Berny A. Subki

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT LOGISTIK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya koridor Logistik Hasil Perikanan	1.	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola (Koridor)	5
2.	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)	2.	Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan (Unit)	1
3.	Tersedianya data dan informasi logistik hasil KP	3.	Data dan informasi logistik hasil kelautan dan perikanan (Data)	4
4.	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok	4.	Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8
5.	Tersedianya rekomendasi kebijakan pemasukan produk perikanan berbasis mekanisme Neraca Komoditas	5.	Rekomendasi Kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas (Rekomendasi Kebijakan)	5
6.	Terciptanya kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP	6.	Kesepakatan kemitraan antar pelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29
7.	Tersedianya sarana penyimpanan produk KP	7.	Sarana Penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15
8.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP	8.	Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5
9.	Tersedianya sarana distribusi logistik produk KP mendukung Major Project Korporasi Usaha	9.	Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi)	5
10.	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang	10.	Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang yang dibina (Lembaga)	10

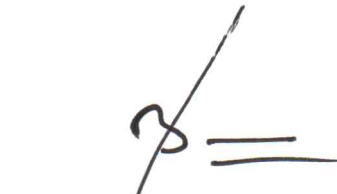
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
11.	Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan	11.	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8
12.	Tersedianya prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton	12.	Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun (Unit)	4
13.	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	13.	Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku yang disediakan (Unit)	287
14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	14.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.100
15.	Nilai PNBP Sektor KP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	15.	Nilai PNBP di Lingkungan Direktorat Logistik (Rp Miliar)	2,06
16.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Logistik	16.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87
		17.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	84
		18.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Logistik (%)	100
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Direktorat Logistik (%)	80
		20.	Persentase unit kerja Direktorat Logistik yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Logistik (%)	80
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Logistik (%)	95

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan	57.574.000
Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2024		57.574.000


Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



Budi Sulistiyo

**Pihak Pertama,
Direktur Logistik**



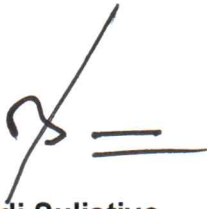
Berny A. Subki

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan	57.574.000
Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2024		57.574.000

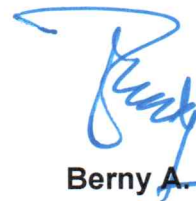
Jakarta, Januari 2024

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



Budi Sulistiyo

**Pihak Pertama,
Direktur Logistik**



Berny A. Subki